



MODUL



PEREKONOMIAN & BISNIS INDONESIA



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-6963-80-7



9 786236 963807

Wilson Rajagukguk

Perekonomian dan Bisnis Indonesia

Wilson Rajagukguk



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
**Universitas Kristen
Indonesia**
Jakarta, Indonesia

Perekonomian dan Bisnis Indonesia

Penulis:

Wilson Rajagukguk

Editor:

Indri Jatmoko, S.Si., MM

ISBN: 978-623-6963-80-7

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, Desember 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan atas terbitnya Modul Perekonomian dan Bisnis Indonesia ini. Modul ini dit-ulis sebagai bahan pembelajaran untuk digunakan dalam mendalami ekonomi dan bisnis Indonesia. Modul ini dapat dipelajari secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat dan secara khusus oleh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis.

Secara formal modul ini digunakan pada lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisbni, Uni- versitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Kristen Indonesia yang memberi dukungan dalam penulisan buku modul ini. Terima kasih kepada

Dr. Desi Sianipar, M.Th, Kepada Biro Perencanaan dan Evaluasi Akademik (BPEA) dan tim yang menolong memberi pengarahan serta bantuan format modul.

Ibu Dina Robiana Sitompul, S.Kom., M.TI., Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) UKI yang menolong memberi pengarahan tentang valuasi penulisan modul.

Pdt. Indri Jatmoko MM., Kepala UKI Press yang memberi waktu mengedit, mengu- rus ISBN, dan menerbitkan Modul ini.

Ibu **Sari Mentari Simanjuntak, S.Sos.** dan tim Perpustakaan UKI, yang menolong membangun *repository* karya ilmiah ini

Terima kasih kepada para mahasiswa lintas angkatan yang telah mengikuti perkuliahan Ekonomi dan Bisnis Indonesia di lingkungan Universitas Kristen Indonesia. Interaksidi kelas banyak menolong

penulis dan tanpa diketahui dan disadari penulis memper- oleh banyak pembelajaran dari mahasiswa. Penulis banyak belajar dari mahasiswa yang mengikuti kelas ini.

Jakarta, Desember 2021

Wilson Rajagukguk

Untuk:

Omas Bulan Samosir, Ph.D., Isteri Terkasih, Belahan jiwa.

Josia Rajagukguk, S.ARs., Putera Sulung,- Buha baju, Tampuk ni Ate-ate.

Hasiana Emanuela Rajagukguk, Boru Hasian,-Tampuk ni Pusu-pusu.

KATA PENGANTAR

Mata kuliah Perekonomian dan Bisnis Indonesia merupakan matakuliah wajib yang disampaikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB UKI) Jakarta.

Mata kuliah tersebut membahas beberapa topik sehubungan perekonomian dan bisnis Indonesia yang relevan untuk dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan pengetahuan tentang tahap dan permasalahan utama pada pembangunan ekonomi dan bisnis Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan menitikberatkan analisis keadaan ekonomi paling mutakhir dan proyeksi serta kemungkinan perkembangan pada masa depan.

Indonesia terus berkembang. Dinamikan perkembangan ekonomi dan bisnis Indonesia dibahas dan dipelajari.

Pembelajaran Mata kuliah ini dibagi atas empat kelompok utama, yaitu

1. Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia,
2. Neraca-Neraca Makroekonomi Indonesia,
3. Transformasi Perekonomian dan Bisnis Indonesia Indonesia, serta
4. Kebijakan Perekonomian dan Binsis Indonesia.

Kemudian dalam perjalanan dan pelaksanaannya, dimungkinkan mengadopsi dan meyerap perkembangan dan dinamika ekonomi dan bisnis Indonesia.

Penilaian terhadap mahasiswa terdiri atas

1. UTS,
2. UAS,
3. Penulisan dan presentasi paper, serta
4. *Attitude* mahasiswa serta aktivitas dalam mengikuti perkuliahan.

Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dalam menganalisis dan menerbitkan publikasi bermutu tentang perekonomian dan bisnis Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii

BAB 1 Latar Belakang dan Sejarah Ekonomi dan Bisnis

Indonesia	1
1.1 Pengantar.....	2
1.2 Permasalahan dan Peluang Pembangunan Ekonomi dan Bis-nis Indonesia	5
1.2.1 Demografi	8
1.2.2 Ketenagakerjaan.....	12
1.2.3 Bonus Demografi	14
1.3 Konsep, Strategi, dan Sistem Ekonomi dan Bisnis Indonesia ..	16
1.3.1 Konsep	16
1.3.2 Strategi Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth)	17
1.3.3 Sistem Ekonomi	21
1.4 Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia.....	23
1.4.1 Ekonomi dan Bisnis Indonesia Praemporium Ekonomi Prasejarah.....	23
1.4.2 Periode Pra-kolonialisme	24
1.4.3 Masuknya Eropa	25
1.4.4 Okupasi Jepang (1842-1945)	26
1.4.5 Setelah Kemerdekaan.....	27
1.4.6 Dari Tahun 1998 Hingga Hari Ini	33
1.5 Pelaku dan Peran Perekonomian dan Bisnis Indonesia	33
1.6 Soal dan Umpan Balik	38

BAB 2 NERACA-NERACA MAKROEKONOMI INDONESIA

2.1 Pengantar.....	40
2.2 Produk Domestik Bruto, Inflasi, dan Pengangguran.....	40
2.2.1 Soal dan Umpan Balik	51
2.3 Neraca Fiskal.....	53

2.4 Neraca Pembayaran.....	54
2.5 Neraca Moneter dan Financial	56
2.6 Hubungan Antar Negara dan Neraca Arus Dana	59
2.7 Input Output	63
2.8 Sistem Neraca Sosial Ekonomi	64
2.9 Soal dan Umpan Balik	64
BAB 3 TRANSFORMASI PEREKONOMIAN DAN BISNIS INDONESIA	
1.1 Pengantar.....	66
2.1 Konsep Dasar Transformasi Perekonomian dan Bisnis Indonesia	67
3.1 Soal dan Umpan Balik	72
BAB 4 KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAN BISNIS INDONESIA	
4.1 Krisis Ekonomi di Indonesia.....	76
4.2 Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	77
4.3 Perekonomian Indonesia dalam Era Globalisasi, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0	81
4.3.1 Ekonomi Kreatif.....	81
4.3.2 Ekonomi Maritim.....	81
4.4 Soal dan Umpan Balik	83
DAFTAR PUSTAKA	84

1 BAB 1: Latar Belakang dan Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia

1.1 Pengantar

Pembahasan Perekonomian dan Bisnis Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada perkuliahan ini kita menggunakan sudut pandang lingkup politik ekonomi. Politik ekonomi Indonesia merupakan bagian dari politik nasional. Tujuan utama (*ultimate goal*) dari politik ekonomi adalah kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan politik ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah mengarahkan, mendorong bagaimana agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai

Dengan demikian materi dan pembahasan mata kuliah Perekonomian dan Bisnis Indonesia mendapat penekanan pada.

1. Mengidentifikasi masalah-masalah perekonomian dan bisnis yang terjadi Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan garis pantai terpanjang di dunia. Negara yang terus menerus dan yang sedang membangun.

Jika kita mendiskusikan Indonesia dapat kita mulai dengan pertanyaan: Area Indonesia itu apa? Pertanyaan ini akan mencakup diskusi berikut

- (a) Wilayah.
- (b) Kepulauan.
- (c) Batas antara pulau A dan Pulau B.
- (d) Laut dan batasnya.
- (e) Negara yang terbesar di Asean mencakup daratan dan lautan.
- (f) Negara yang agraris yang sedang menuju negara industri.

Memandang Indonesia kita merujuk pada Deklarasi Juanda 1957.

Deklarasi Juanda mendefinisikan bahwa tertorial Indonesia adalah Laut dengan gugusan pulau didalamnya. Inti dari deklarasi Djuanda ialah sebuah pernyataan Indonesia kepada dunia bahwa laut Indonesia ialah

termasuk laut sekitar, diantara serta di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita harus memahami, khususnya mahasiswa bahwa penyelenggaraan deklarasi Djuandasangat penting dipertahankan dan diketahui. Deklarasi Juanda di dasari karena sebelumnya wilayah NKRI mengacu pada ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 yaitu *Tetitoriale Zeeen en Maritieme Kringen Ordonantie*. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu mengatur tentang pulau-pulau yang berada di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. setiap pulau hanya mempunyai laut sejauh 3 KM dari garis pantai. Jika demikian kapal asing akan bebas melayari dan memanfaatkan laut yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia.

Selanjutnya dalam kerangka pengakuan atas wilayah Indonesia, dibentuk konsep Wawasan Nusantara. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerja sama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Ideologi nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional (Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN),

Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, dengan konsep wawasan nusantara bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan seluruh kekayaan alam, sumber daya serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, serasi dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah penghasil secara proporsional dalam keadilan.

Secara astronomis, kepulauan Indonesia terletak pada $6^{\circ}LU-11^{\circ}LS$ dan $95^{\circ}BT-141^{\circ}BT$.

Secara geografis, Kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australiaserta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Batas wilayah Indonesia yaitu:

1. Sebelah Utara: Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik.
2. Sebelah Timur: Papua Nugini.
3. Sebelah Selatan: Samudra Hindia.
4. Sebelah Barat: Samudra Hindia.

Luas wilayah Indonesia mencapai 5.194.143 km². Dua pertiga dari luas wilayah Indonesiaberupa lautan.

Jumlah Pulau di Indonesia (termasuk pulau besar dan pulau kecil) yang tertera pada Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah 17.508 Pulau. (Ke- menterian Kelautan dan Perikanan, 2022 <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>). Sebagaiasn pulau Indonesia belum mempunyai nama. Pembakuan Nama Rupa Bumi unsur Pulau sudah dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini dengan jumlah pulau indonesia yang sudah dilaporkan ke PBB melalui sidang UNGEGN sejumlah 16.671 Pu- lau pada tahun 2019. Disamping itu telah ada penambahan jumlah pulau yang tertera pada Gasetir Nasional pada tahun 2020 sejumlah 16.771 Pulau

Penting bagi mahasiswa Indonesia umumnya dan UKI khususnya untuk mengetahui bahwa letak dan kondisi geografis Indoensia sangat mempengaruhi masa depan. Ma- hasiswa perlu untuk menyadari tugas dan tanggung jawab mempertahankan dan mem- bangun Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah.

Masa depan Indonesia adalah juga dipandang dari letak dan kondisi geografisnya. Indone- sia mempunyai pengalaman pahit ketika kehilangan 4 pulau yaitu Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Pulau Yako dan Pulau Kambing.

Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kita bersama harus peduli dan mengetahui wilayah dan geografi Indonesia. Geografi menjadi salah satu determinan masa depan Indonesia. Keberadaan Indonesia ditentukan seberapa jauh seluruh warga negara mengenaldan memahami wilayahnya. Wawasan Nusantara menjadi sangat penting dipegang sebagai konsepsi wawasan nasional Bangsa Indonesia.

Setelah dibagi atas 4 pokok utama, selanjutnya mata kuliah ini membahas antara lain

1. Menganalisis masalah-masalah Perekonomian dan Bisnis Indonesia: latar belakangnya, faktor-faktor penyebabnya dan dampak serta pengaruhnya.
2. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan mengevaluasi efek hasilnya.
3. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam APBN, kebijakan perdagangan dan pembayaran dalam Neraca Pembayaran, kebijakan stabilitasi harga (inflasi), nilai tukar (kurs) rupiah, suku bunga, kredit bank dalam Moneter dan Perbankan serta kebijakan penurunan kemiskinan dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat serta kebijakan menyongsong Revolusi Industri.

Sesuai dengan rumusan tujuan dan materi pembahasan di atas, maka sub topik yang dibahas pada Modul 1 antara lain

1. Permasalahan pembangunan Ekonomi Indonesia,
2. Sejarah Perekonomian Indonesia,
3. Sistem Ekonomi Indonesia,
4. Pelaku dan Peran Perekonomian Indonesia.

1.2 Permasalahan dan Peluang Pembangunan Ekonomi dan Bis-nis Indonesia

A. Masalah yang Menyertai Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Kesejahteraan penduduk didapat dari peningkatan *output* per kapita (Mankiw, N. G., 2016) dan perubahan struktural perekonomian.

Perubahan struktur perekonomian didapat dari sisi akumulasi (pengembangan kualitatif dan kuantitatif), sisi alokasi (penggunaan anggaran), sisi Institusional (kelembagaan Ekonomi dan bisnis), sisi distribusi (pembagian pendapatan nasional).

Sebagai negara kepulauan, ekonomi dan bisnis Indonesia mempunyai karakter khusus dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain

1. Faktor Geografi yang merupakan negara kepulauan yang membentang dalam tiga zonawaktu, dengan lokasi di antara dua benua dan dua samudera.

Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 270 juta orang (2020, Proyeksi BPS). Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah

A.1.Faktor Kesenjangan,

Dari gambar 5 kita dapat melihat terjadinya kesenjangan dari sisi PDB Wilayah,- dalam hal ini kelompok pulau di Indonesia

Sebanyak 57, 77% PDB Indonesia disumbang Pulau Jawa, 21, 9% disumbang Pulau Su-

matera, sebesar 8, 31%, 6, 98%, 2, 75%, dan 2, 41% masing oleh Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku dan Papua. Dari gambar ini terlihat kesenjangan pembangunan produktivitas ekonomi Indonesia.

Luasnya wilayah Indonesia seharusnya kita dimanfaatkan untuk persebaran tenaga kerjayang merata. Hal ini tidak terjadi. Para tenaga kerja terlalu terkonsentrasi diri ke Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak dijadikan tempat tujuan bekerja karena secara fisiologis pulau tersebut dianggap strategis dalam mencari penghasilan yang layak.

Perlu menjadi catatan bahwa Pulau Jawa sendiri sudah cukup padat dan persaingan di antara pekerja di pulau tersebut juga terhitung ketat. Pada sisi lain, daerah di luar Pulau Jawa dapat dan sudah mempunyai lapangan kerja yang luas dan potensi yang melimpah yang bisa dioptimalkan oleh para tenaga kerja di Indonesia. Indonesia mempunyai pengalaman dalam hal ini, yakni melakukan program transmigrasi. Rencana Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan juga dapat menjadi salah satu penyelesaian masalah ini.

A.2. Faktor sosial, budaya dan politik

Salah satu kekuatan dan dapat menjadi keterbatasan pembangunan ekonomi jika tidak diberdayakan dengan baik adalah faktor sosial, budaya, dan politik

Bangsa Indonesia mempunyai dan terdiri dari sangat banyak suku disertai dengan beragam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang seringkali dalam sejarah terjadi dan menimbulkan konflik sosial.

Indonesia masih mencatat latar belakang budaya Timur: bangsa “Timur” (bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia II). Budaya Timur berdampak orientasi status (Status orientation). Budaya status orientation mempunyai ciri antara lain:

1. Senang mengejar pangkat, kedudukan,
2. Senang dengan simbol-simbol sosial,
3. Etos kerja yang lemah,
4. Senang bersantai-santai,
5. Tingkat disiplin rendah,
6. Kurang menghargai waktu (jam karet),
7. Status orientasi kurang produktif, konsumtif, suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial.
8. Ciri yang merupakan sisa-sisa kekuasaan raja-raja, feodalisme, dan

kolonialisme masih mengakar kuat. Sebelum kedatangan asing, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme.

Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter (laksana tuan terhadap budak).

9. Sisa-sisa pengaruh feodalisme (kultus individu) dan pengaruh kolonialisme (otoriter) sampai sekarang belum terkikis habis.

Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Padagilirannya hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.

10. Uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan.

11. Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah:

- 1) Potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi.
- 2) Potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya.
- 3) Potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial-politik.

1.2.1 Demografi

Indonesia sebagai negara dengan penduduk ke-4 terbanyak di dunia. Proyeksi tahun 2010-2035 (BPS, 2022) disajikan dalam Tabel 1 menyatakan bahwa penduduk Indonesia sebanyak (dalam ribuan) 238518.80 tahun 2010, 255461.70 tahun 2015, 271066.40 tahun 2020, 284829.00 tahun 2025, 296405.10 tahun 2030, dan 305652.40 tahun 2035.

Persebaran Penduduk Indonesia tidak merata menurut pulau dan wilayah. Tabel 5 menunjukkan persebaran penduduk Indonesia menurut pulau tahun 2010. Sebanyak 21,32

% tinggal di Pulau Sumatera, 57,45% tinggal di Pulau Jawa, dan sisanya tinggal di pulau lainnya. Persebaran ini menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan berdampak menumpuknya kegiatan ekonomi dan bisnis di Pulau Jawa. Pemerintah telah mencoba berbagai upaya dalam menangani permasalahan persebaran penduduk dari program transmigrasi hingga kebijakan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

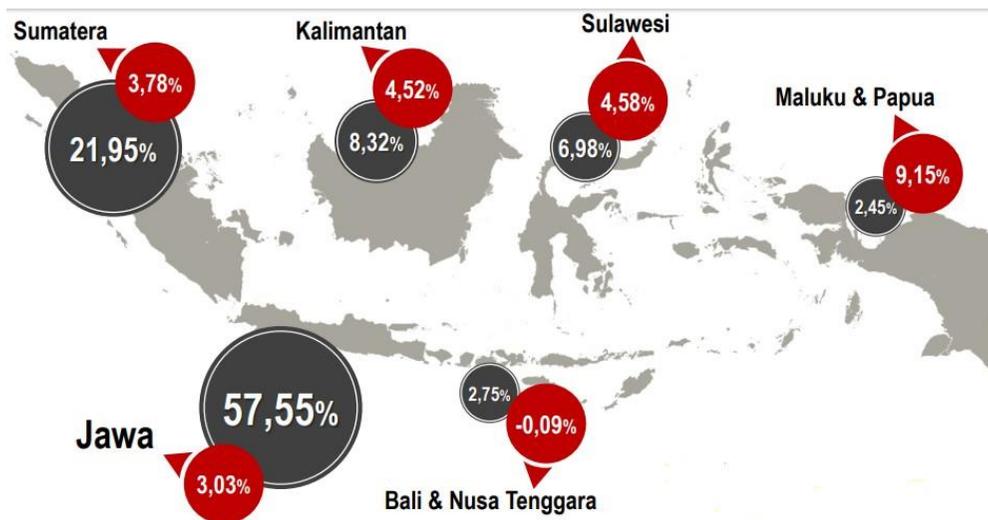


Figure 5: Distribusi Persentasi dan Angka Pertumbuhan PDB menurut kepulauan, 2019

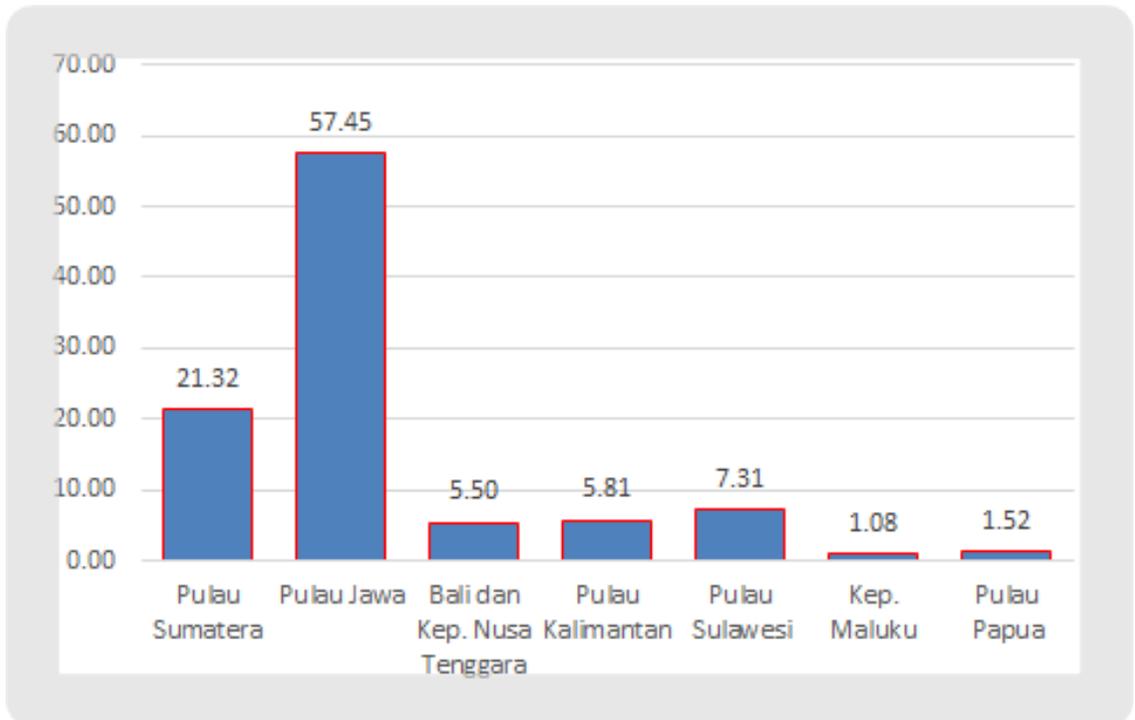


Figure 6: Persentase Penduduk Indonesia menurut Pulau, 2010

Tabel 1: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010- 2035

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	4523.10	5002.00	5459.90	5870.00	6227.60	6541.40
Sumatera Utara	13028.70	13937.80	14703.50	15311.20	15763.70	16073.40
Sumatera Barat	4865.30	5196.30	5498.80	5757.80	5968.30	6130.40
Riau	5574.90	6344.40	7128.30	7898.50	8643.30	9363.00
Jambi	3107.60	3402.10	3677.90	3926.60	4142.30	4322.90
Sumatera Selatan	7481.60	8052.30	8567.90	9000.40	9345.20	9610.70
Bengkulu	1722.10	1874.90	2019.80	2150.50	2264.30	2360.60
Lampung	7634.00	8117.30	8521.20	8824.60	9026.20	9136.10
Kepulauan Bangka Belitung	1230.20	1372.80	1517.60	1657.50	1788.90	1911.00
Kepulauan Riau	1692.80	1973.00	2242.20	2501.50	2768.50	3050.50
Pulau Sumatera	50860.30	55272.90	59337.10	62898.60	65938.30	68500.00
DKI Jakarta	9640.40	10177.90	10645.00	11034.00	11310.00	11459.60
Jawa Barat	43227.10	46709.60	49935.70	52785.70	55193.80	57137.30
Banten	10688.60	11955.20	13160.50	14249.00	15201.80	16033.10
Jawa Tengah	32443.90	33774.10	34940.10	35958.60	36751.70	37219.40
DI Yogyakarta	3467.50	3679.20	3882.30	4064.60	4220.20	4348.50
Jawa Timur	37565.80	38847.60	39886.30	40646.10	41077.30	41127.70
Pulau Jawa	137033.30	145143.60	152449.90	158738.00	163754.80	167325.60
Bali	3907.40	4152.80	4380.80	4586.00	4765.40	4912.40
Nusa Tenggara Barat	4516.10	4835.60	5125.60	5375.60	5583.80	5754.20
Nusa Tenggara Timur	4706.20	5120.10	5541.40	5970.80	6402.20	6829.10
Bali dan Kep. Nusa Tenggara	13129.70	14108.50	15047.80	15932.40	16751.40	17495.70
Kalimantan Barat	4411.40	4789.60	5134.80	5432.60	5679.20	5878.10
Kalimantan Tengah	2220.80	2495.00	2769.20	3031.00	3273.60	3494.50
Kalimantan Selatan	3642.60	3989.80	4304.00	4578.30	4814.20	5016.30
Kalimantan Timur	3576.10	4068.60	4561.70	5040.70	5497.00	5929.20
Pulau Kalimantan	13850.90	15343.00	16769.70	18082.60	19264.00	20318.10
Sulawesi Utara	2277.70	2412.10	2528.80	2624.30	2696.10	2743.70
Sulawesi Tengah	2646.00	2876.70	3097.00	3299.50	3480.60	3640.80
Sulawesi Selatan	8060.40	8520.30	8928.00	9265.50	9521.70	9696.00
Sulawesi Tenggara	2243.60	2499.50	2755.60	3003.00	3237.70	3458.10
Gorontalo	1044.80	1133.20	1219.60	1299.70	1370.20	1430.10
Sulawesi Barat	1164.60	1282.20	1405.00	1527.80	1647.20	1763.30
Pulau Sulawesi	17437.10	18724.00	19934.00	21019.80	21953.50	22732.00
Maluku	1541.90	1686.50	1831.90	1972.70	2104.20	2227.80
Maluku Utara	1043.30	1162.30	1278.80	1391.00	1499.40	1603.60
Kep. Maluku	2585.20	2848.80	3110.70	3363.70	3603.60	3831.40
Papua Barat	765.30	871.50	981.80	1092.20	1200.10	1305.00
Papua	2857.00	3149.40	3435.40	3701.70	3939.40	4144.60
Pulau Papua	3622.30	4020.90	4417.20	4793.90	5139.50	5449.60
INDONESIA	238518.80	255461.70	271066.40	284829.00	296405.10	305652.40

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

1.2.2 Ketenagakerjaan

Sebagaimana halnya dengan semua negara di dunia, Indonesia mempunyai permasalahan tersendiri dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran yang sulit diatasi.

Berikut didaftarkan sejumlah isu ketenagakerjaan di Indonesia:

1. Jumlah Angkatan Kerja yang Besar.

Analisis tentang pasar tenaga kerja, Indonesia mempunyai penawaran berupa jumlah tenaga kerja yang besar, namun pada sisi lain permintaan tenaga kerja dari sisi jumlah lapangan kerja sedikit. Dampaknya daya serap tenaga kerja di Indonesia menjadi tidak seimbang. Angka pengangguran menjadi permasalahan besar dari situasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Dari Gambar 7 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia cukup besar. Pada bulan Agustus 2021, di Indonesia terdapat sebanyak 206,71 juta tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja ini terbagi menjadi 140,15 juta orang Angkatan Kerja dan 66,56 juta orang Bukan Angkatan Kerja. Sebanyak 131,05 juta orang Bekerja dan 9,19 juta orang menganggur. Dari antara Pekerja, terdapat sebanyak 84,26 juta orang Pekerja Penuh, 35,37 juta orang Pekerja Paruh Waktu, dan 11,42 juta orang setengah menganggur.

Salah satu permasalahan tenaga kerja kita adalah besarnya Penganggur, Pekerja Paruh Waktu, dan Setengah Menganggur. Hal ini menjadi persoalan dalam pendapatan dan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan dan pendapatan yang rendah berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

2. Kualitas Angkatan Kerja Relatif Rendah

Gambar 8 dapat digunakan sebagai potret terhadap angkatan kerja Indonesia. Terlihat bahwa sebagian besar yakni sebanyak 49,39 juta orang (7,69 persen) tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD ke bawah. Sebanyak 23,28 juta orang (17,76 Persen) berpendidikan SMP, sebanyak 24,72 juta orang (18,87 persen) berpendidikan SMA, dan sebanyak 16,85 juta orang (12,86 persen) berpendidikan SMK. selanjutnya sebanyak 2,46 juta orang (2,64 persen) berpendidikan Diploma I/II/III dan sebanyak 13,34 juta orang (10,18 persen) berpendidikan Universitas.

Kuantitas angkatan kerja yang banyak tidak diimbangi dengan kualitas setiap angkatan kerja yang cenderung rendah. Kualitas yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang ada.

Terdapat juga tenaga kerja Indonesia dengan pendidikan cukup tinggi dan memadai bagi sebuah pekerjaan namun tidak mampu bekerja sesuai keinginan. Hal ini disebabkan karena mutu pendidikan yang rendah di beberapa instansi pendidikan atau bisa juga karena daya serap yang kurang terhadap ilmu pengetahuan.

3. Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata

Luasnya wilayah Indonesia mestinya bisa dimanfaatkan untuk persebaran tenaga kerja. Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Para tenaga kerja terlalu memusatkan diri ke Pulau Jawa. Hal ini juga dipengaruhi oleh salah satu diantara faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, yaitu faktor fisiologis. Faktor ini merupakan faktor yang membuat seseorang berpindah atau bekerja di suatu tempat. Berdasarkan faktor ini, Pulau Jawa banyak dijadikan tempat tujuan bekerja karena secara fisiologis pulau tersebut dianggap strategis dalam mencari penghasilan yang layak.

Padahal, Pulau Jawa sendiri sudah cukup padat dan persaingan di pulau tersebut juga terhitung ketat. Padahal, daerah di luar Pulau Jawa juga mempunyai lapangan kerja yang luas dan potensi melimpah yang bisa

dioptimalkan oleh para tenaga kerja di Indonesia. Transmigrasi bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah ini.

4. Gaji Para Pekerja yang Rendah

Gambar 9, memperlihatkan contoh upah buruh di Indonesia menurut Lapangan Kerja (Agustus 2021). Rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp. 2,74 juta per bulan, dengan rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp. 2,96 juta per bulan dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp. 2,35 juta per bulan. Dalam hal jender, terlihat perbedaan upah buruh yang nyata.

B. Peluang Perekonomian dan Bisnis Indonesia

1.2.3 Bonus Demografi

Bonus demografi (*demographic dividend*) didapatkan melalui sejumlah mekanisme. Mekanisme yang paling penting adalah penawaran tenaga kerja (*labor supply*), tabungan (*savings*) dan modal manusia (*human capital*) (Rajagukguk dan Samosir, 2015)

Bonus Demografi (*demographic dividend*) adalah akselerasi/percepatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan dampak positif dari transisi demografi. Transisi demografi terjadi dan dinikmati sebagai hasil dari pembangunan dalam bidang kependudukan. Transisi demografi tidak terjadi terus menerus, tetapi pada suatu jenjang waktu. Jenjang waktu ini kemudian dinamai sebagai jendela kesempatan (*window opportunity*). Jendela kesempatan perlu dimanfaatkan oleh pengambil keputusan dan pemangku kepentingan supaya transisi demografi yang merupakan hasil pembangunan kependudukan dapat dikonversi menjadi bonus, khususnya dalam bidang ekonomi, demi kesejahteraan penduduk

Penawaran Tenaga Kerja (*Labor Supply*)

Transisi demografi mempengaruhi penawaran tenaga kerja (*labor supply*) dalam dua cara. Pertama, terdapat sebuah efek mekanikal esensial didasarkan atas generasi ledakan bayi. Ketika generasi ini berumur 15-64

tahun, diasumsikan mereka cenderung bekerja. Hal ini menurunkan rasio penduduk yang tergantung pada yang tidak tergantung. Pada tahun puncak kerja (*peak working years*) usia 25-59 tahun, dampak ini sangat kuat. Jumlah orang yang ingin bekerja (*labor supply*) semakin besar, dan menyediakan pasar tenaga kerja yang dapat menampung pekerja sehingga produksi per kapita meningkat. Kedua, perempuan akan cenderung memasuki lapangan kerja (*workforce*) ketika ukurankeluarga (*family size*) menurun. Dampak ini diperbesar oleh fakta bahwa perempuan dewasa dalam sebuah keluarga kecil, mereka cenderung semakin berpendidikan. Hal ini meningkatkan produktivitas mereka dalam pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, keluargayang semakin kecil mendorong angkatan kerja yang lebih produktif.

Tabungan

Transisi demografi juga mendorong pertumbuhan tabungan. Tabungan ini kemudian memperbaiki sebuah prospek investasi dan pertumbuhan sebuah negara. Penduduk cenderung menabung lebih banyak pada umur 40-65 tahun. Pada usia ini mereka kurang berinvestasi pada anak-anak mereka, tetapi menabung untuk persiapan pensiun

Ketika generasi ledakan bayi mencapai umur 40-an tahun, tabungan nasional cenderung meningkat. Terdapat insentif untuk melakukan pilihan yang dapat memperkuat kecenderungan menabung di antara generasi ini. Kondisi lebih sehat dan umur panjang membuat mereka lebih cenderung menabung. Penduduk yang lebih sehat harus merencanakan ekonominya jauh ke depan jika ingin mempertahankan standar hidup setelah memasuki masa pensiun. Dana pensiun lebih penting bagi keluarga kecil dan tinggal di daerah urban. Sebuah keluarga besar sering memelihara keluarga mereka yang lebih tua dan anggota keluarga lanjut usia ini dapat hidup walau tanpa dana pensiun. Semakin modern, keluarga perkotaan cenderung menjadi hanya keluarga ini. Selanjutnya, keluarga inti dimana kedua orang tua bekerja, lebih cenderung menabung untuk masa tua sehingga tabungan keluarga dapat menjadi akumulasi modal (*capital accumulation*) bagi pembangunan sebuah bangsa.

Modal Manusia (*Human Capital*)

Ketiga, transisi demografi mempunyai dampak signifikan terhadap investasi pada modal manusia (*human capital*). Dampak investasi inilah yang paling tidak kelihatan, tetapi mungkin yang paling signifikan dan sulit dijangkau. Transisi demografi dimulai dari perubahan dalam mortalitas yang berdampak pada penduduk hidup lebih lama dan lebih sehat. Sebuah angka harapan hidup yang lebih panjang mengakibatkan perubahan fundamental dalam hal bagaimana penduduk hidup. Sikap dan cara pandang pada pendidikan, keluarga, masa tua, peranan perempuan dan kerja cenderung bergeser. Sebuah masyarakat, khususnya jika dapat mengambil sepenuhnya keuntungan dari bonus demografi, akan mengalami perubahan dalam budaya karena memandang manusia sebagai aset yang semakin berharga

1.3 Konsep, Strategi, dan Sistem Ekonomi dan Bisnis Indonesia

1.3.1 Konsep

Secara umum konsep pertumbuhan Ekonomi dan Bisnis Indonesia dapat digambarkan dengan rumus berikut:

$$Y = C + I + G + (X - IM)$$

Dimana

Y = output ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto/ GDP = *Gross Domestic Product*).

C = *Consumption* / konsumsi.

I = *Investment (Investasi)* / *Saving* (Tabungan).

G = *Government Expenditure* (Belanja Pemerintah). X = *Export*.

IM = Import .

Selisih antara X dan IM sering disebut sebagai Ekspor Neto.

Konsep pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Pertumbuhan Ekonomi dapat terjadi dan merupakan keseimbangan umum dari Kon- sumsi, Investasi, Belanja Pemerintah, dan Ekspor Neto.

1.3.2 Strategi Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)

Strategi pembangunan dengan pertumbuhan tidak cukup menyelesaikan persoalan-persoalandasar pembangunan. Dalam kiprahnya strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi. adalah tu- gas kita bersama membangun Indonesia agar meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati se- bagaian pelaku ekonomi.

Atas dasar itu, Indonesia menganut strategi pertumbuhan dan pembangunan Berwawasan Nusantara. Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa.

Pembangunan berwawasan nusantara adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembnaganan pembangunan berwawasan nusantara penting. seiring dengan perkem- bangan teknologi (Revolusi Industri) dan pertumbuhan penduduk, Indonesia perlu dan bijaksana memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberdayakan serluruh sum- ber daya yang terkandung di bumi Indonesia. Sumber daya utama Indonesia adalah

penduduknya dengan jumlah besar. Indonesia mempunyai cadangan energi terbarukan yang sangat melimpah seperti sinar matahari, angin, dan laut. Indonesia mempunyai keragaman hayati. Bumi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dari sisi Pariwisata.

Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengan mengutamakan berlangsungnyamekanisme pasar dengan mengutamakan kepentingan rakyat

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan bisnis tertuang dalam Isi Pembukaan UUD 45 dengan Pancasila. Pembangunan dapat diselenggarakan pemerintah dengan tujuan

- (a) Memajukan kesejahteraan umum.
- (b) Memajukan kecerdasan bangsa..
- (c) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Dalam Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2 terkandung amanat kepada pemerintah sebagai pelaku ekonomi dan bisnis yang bertujuan mendapatkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui:

- (a) Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
- (b) Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
- (c) Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan
- (d) Penyediaan lapangan kerja

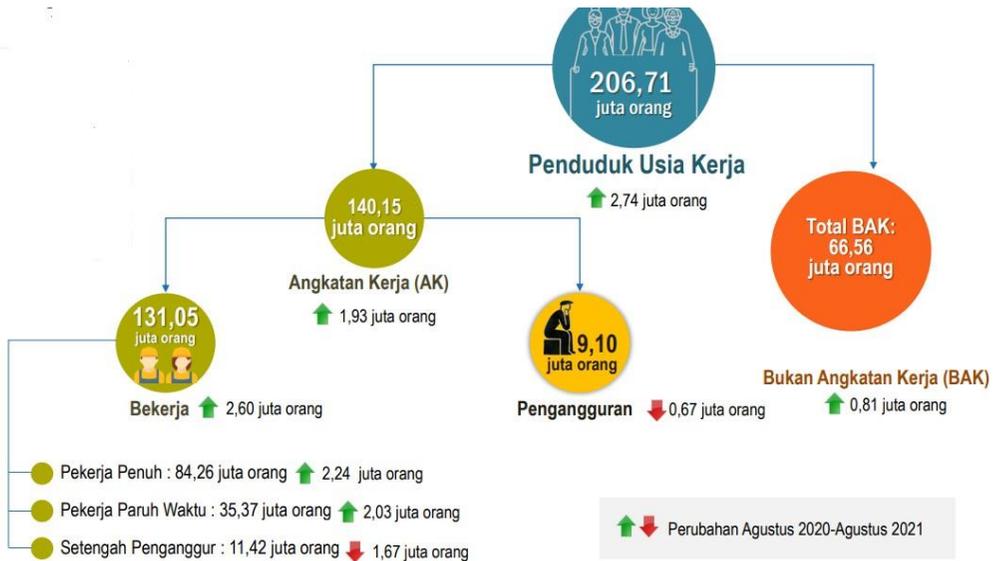


Figure 7: Statistik Tenaga Kerja Indonesia

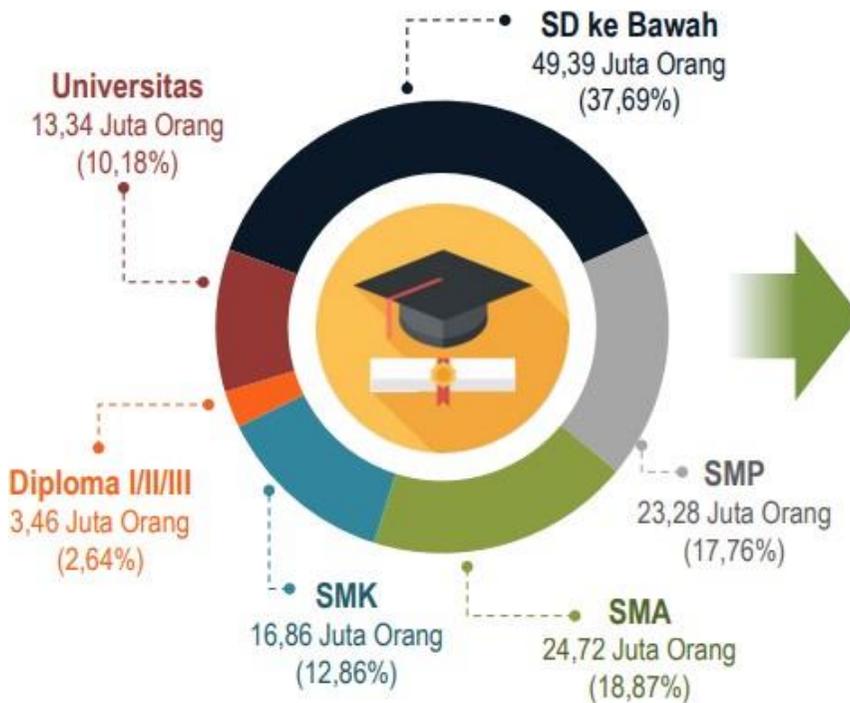


Figure 8: Distribusi Upah Tenaga Kerja Indonesia menurut Pendidikan, 2020

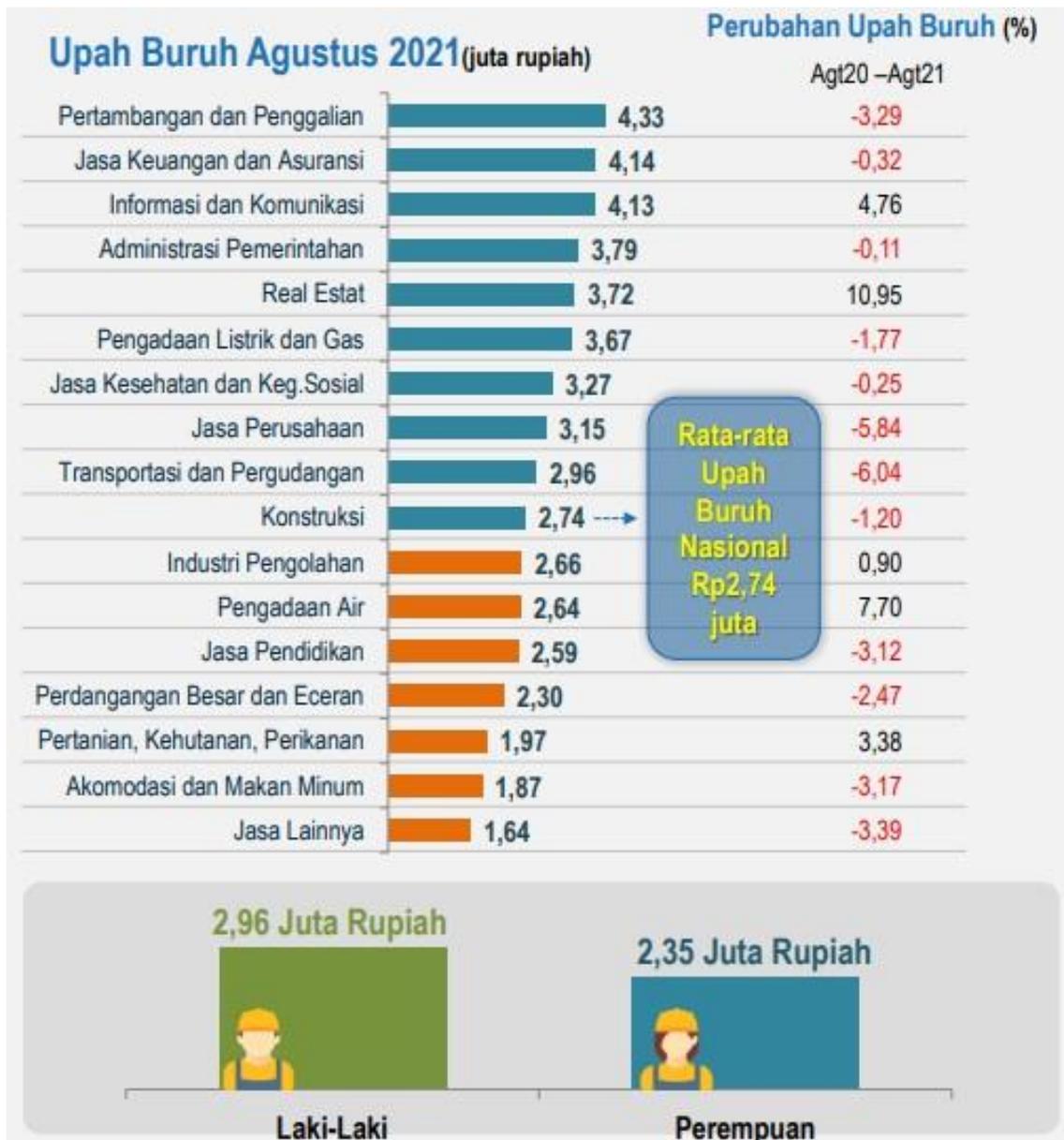


Figure 9: Upah Buruh menurut Lapangan Kerja, Agustus 2021

1.3.3 27Sistem Ekonomi

Pengertian Sistem Ekonomi pengertian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan.

Mendefinisikan sistem ekonomi adalah bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Pengertian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan oleh sebuah ekonomi bagaimana mengatur dan mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dan bisnis dalam suatu negara, demi memaksimalkan nilai ekonomi seluruh sumber daya yang dimiliki berikut ini diuraikan sejarah sistem ekonomi di Indonesia Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia

Dalam perjalanannya, Indonesia sudah menganut 4 sistem ekonomi sejak masa kolonial-isme hingga hari ini. Berikut diuraikan sistem ekonomi di Indonesia menurut sejarah perjalanannya.

1. Sistem Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Pada masa ini sering kali terjadi perubahan kabinet dan berdampak pada lemahnya ekonomi dan bisnis Indonesia.

Pada periode ini, Indonesia mengalami kebijakan menggunting uang kertas nominal Rp. 5 menjadi dua bagian. Bagian pertama bernilai Rp. 2,5 dan bagian lainnya senilai Rp. 2,5 dan digunakan sebagai pembayaran yang sah dan membeli obligasi pinjaman nasional

Pada masa ini terjadi juga sebuah gerakan yang disebut gerakan banteng yang merubah struktur ekonomi dan struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.

2. Sistem Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

Pada era demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi etatisme. Pada era ini seluruh sistem ekonomi diatur dan dikuasai oleh negara.

Pada era ini, Indonesia mengalami penurunan nilai uang, uang kertas dengan nominal Rp. 1.000 turun menjadi bernilai Rp. 100

3. Sistem Ekonomi pada Masa Demokrasi Ekonomi (1967-1998)

Disebut bahwa pada era 1967 - 1998 terjadi demokrasi ekonomi di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran antara pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan produktivitas melalui kegiatan ekonomi.

Pemerintah mengambil posisi sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat sepenuhnya menjadi pelaku ekonomi. Usaha ini dilakukan dengan tujuan membantu masyarakat agar terhindar dari kesulitan kekuasaan pasar dalam menentukan harga barang dan jasa yang diproduksi.

Pada masa ini Indonesia bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF). Dampaknya banatuan utang keuangan asing masuk ke Indonesia. Kebijakan lain pada masaini adalah menghapus kebijakan hiperinflasi dengan melarang pendanaan domestik dengan mencetak uang. Indonesia melakukan pembebasan bea cukai impor dan mendevaluasikan rupiah yang berdampak pada peningkatan nilai ekspor.

4. Sistem Ekonomi pada Masa Demokrasi Pancasila (1998-Sekarang)

Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran.

Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.

Karakteristik Sistem Ekonomi Indonesia

Negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat.

1.4 Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Pada bagian ini akan kita bahas Perekonomian dan bisnis Indonesia sebagai berikut

1.4.1 Ekonomi dan Bisnis Indonesia Praemporium

Ekonomi Prasejarah

Ekonomi dan bisnis Pra Sejarah Nusantara sangat erat kaitannya dengan masa prasejarah Nusantara. Masa Pra Sejarah Indonesia paralel dengan sejarah umat manusia Nusantara/Indonesia dan sejarah alam semesta.

Indonesia/Nusantara telah didiami manusia purba yang sejak pada awal masa Plestosen. Manusia purba Nusantara ini yang dikenal dengan sebutan *Pithecanthropus Modjokertensis*. Disamping itu sudah terdapat pula *Meganthropus palaeo javanicus*. Pada jaman selanjutnya manusia Nusantara/Indonesia semakin maju menjadi manusia *Pithecanthropus erectus* dan *Pithecanthropus soloensis*. Kedua jenis manusia Indonesia/Nusantara ini hidup pada masa plestosen tengah dan akhir bersama-sama dengan *Homo sapiens*. Pada jaman ini ekonomi dilakukan dengan berburu dan mengumpulkan makanan,

Rentang waktu Plestosen berlangsung kurang lebih tiga juta tahun. Salah satu ciri masa ini adalah bahwa perkembangan jasmani dan rohani manusia sangatlah lambat. Selama masa tersebut pola hidup berburu dan mengumpulkan makanan, dijalani manusia Nusantara/Indonesia tanpa banyak mengalami perubahan. Dengan alat-alat yang sangat sederhana mereka melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang sangat tergantung pada alam dan lingkungan hidup.

Sampai pada permulaan tahun masehi, manusia Indonesia/Nusantara sudah bertempat tinggal di gua-gua walau belum menetap. Di samping itu ditemukan juga berbagai alat yang menunjukkan peningkatan kehidupan. Telah ditemukan benda-benda dan alat-alat yang terbuat dari logam menggantikan fungsi dari alat-alat dan benda-benda batu.

Seiring dengan itu nampaknya manusia Indonesia/Nusantara sudah mulai bercocok tanam dan juga mulai menggunakan perhiasan berupa gelang dari batu dan kerang. Pada beberapa daerah di Jawa Barat, ditemukan bahwa manusia sudah menggunakan perhiasan gelang dari batu-batu pilihan seperti agat, kalsedon dan jaspis berwarna putih, kuning, coklat, merah dan hijau.

1.4.2 Periode Pra-kolonialisme

Terdapat sejumlah kerajaan terkemuka di kepulauan Indonesia pada masa prakolonialisme. Kerajaan ini dipengaruhi oleh India (khususnya Hinduisme dan Budha Mahayana) dan Islam. Beberapa kerajaan besar yang dipengaruhi India, antara lain Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Sistem perdagangan Asia Selatan membawa peradaban India dari abad pertama hingga abad ke tujuh, terjadi perdagangan besar antara Tiongkok dan India, dimana Asia Tenggara hanya merupakan pelabuhan perantara yang berlayar melalui rute perdagangan tersebut. Dimulai dari India (umumnya Gujarat), pedagang berlayar melalui Pantai Malabar, ke Pantai Coromandel di Burma, dan turun ke Isthmus. Dari Isthmus mereka membawa komoditas ke FU-nan (Kamboja), kemudian ke Vietnam, hingga mencapai Tiongkok.

Selanjutnya India mendominasi rute perdagangan, disertai dengan penyebaran ide religius India pada waktu itu mempengaruhi region Asia Tenggara. Pada awal abad tersebut, elemen peradaban India dibawa ke Sumatera dan Jawa, dan memperkuat pentingnya pemusatan kekuasaan dan mengorganisasi masyarakat.

Sebelum abad ke tujuh, pengaruh India pada Sriwijaya yang berpusat di Palembang, bagian Timur Sumatera berpengaruh besar di Sumatera, Jawa Bagian Barat, dan sebagian besar Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Sunda.

Kerajaan Sriwijaya menguasai daerah perdagangan dan bertindak sebagai perantara pasar Tiongkok, Indonesia, dan India. Era emas kerajaan Hindu-Budha Jawa terjadi pada akhir abad ketigabelas dan abad keempat belas, era Majapahit. Kerajaan Majapahit menegakkan pengaruhnya pada sebagian besar teritori yang dikenal dengan Indonesia modern.

Pada pertengahan abad kelimabelas, terjadi perpecahan pada kerajaan Majapahit karena krisis suksesi dan persaingan ekonomi dengan jaringan perdagangan Malaya dimana pemerintah Malaya sudah mengadopsi Islam.

Perkembangan Islam melalui Malaka, sebuah kota pelabuhan kaya menguasai selat Malaka dan menguasai perdagangan nusantara selama abad kelima belas. Kerajaan Islam sangat kuat pada masa itu adalah kerajaan Aceh. Pada bagian Timur Indonesia, seperti Ternate, Tidore, Halmaera, Gowa sudah mempunyai Sultan Muslim. Pada awal abad ketujuh belas, kerajaan paling berkuasa di Jawa Tengah adalah Mataram yang menjalin persahabatan dengan kerajaan pesisir, khususnya Gresik

1.4.3 Masuknya Eropa

2.1. Portugis Portugis merupakan negara Eropa yang datang bersahabat ke Nusantara. Eksplorasi Portugis di Asia dimulai dengan pelayaran Vasco da Gama ke India pada tahun 1497 - 1499 dan berlanjut hingga pertengahan abad ke sembilan belas. Portugis datang ke Indonesia dan memonopoli perdagangan rempah-rempah dari bagian Timur Nusantara

2.2. Belanda (*The United East India Company, 1602-1795*)

Empat kapal Belanda pertama yang memasuki Indonesia pada tahun 1596 memasuki Banten. Tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1602 beberapa perusahaan Belanda bergabung dan membentuk perusahaan the United East India Company, kemudian berubah nama menjadi, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC (1602-1795)*.

Sepanjang abad kedelapan belas, gula dan kopi merupakan produk ekspor dari Indonesia dan Pulau Jawa menjadi area paling penting utamanya, khususnya Batavia (sekarang menjadi Jakarta). Selanjutnya VOC berhasil mengambil alih kekuasaan dari penguasa lokal dan juga area produktif di Pulau Jawa.

2.3. Inggris (1811 - 1916)

Lois Bonaparte, yang telah menjadi raja di Nederland diangkat oleh saudaranya Napoleon, menugasi Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal ingin mengubah sistim politik feodal Jawa dan mendorong sebuah reformasi. akan tetapi pada tahun 1811, satu tahun setelah Belanda digabungkan dengan kerajaan Perancis, Inggris menguasai Jawa.

Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur Jawa (1811 -1816). Raffles telah melakukan reformasi komprehensif, sejumlah pemikirannya menceraikan seperti penghapusan kerja paksa, menetapkan kuota untuk produk pertanian, kebebasan memilih bercocok tanam bagi petani, gaji paga pekerja pemerintah.

2.4. Belanda (datang kembali)

Pada awal perang Napoleon, pemerintah Inggris berjanji kepada pemerintah Belanda bahwa pada akhir perang teritori yang dikuasai akan dikembalikan ke Belanda. Pada masa pemerintahan Raffles, otoritas Belanda dibangun kembali pada tahun 1816.

Pada awal abad kesembilan belas Indonesia tidak hanya menghadapi pertukaran kekuasaan perusahaan oleh pemerintah Belanda tetapi juga transformasi absolut Jawa ke dalam sebuah masyarakat kolonial dan kesuksesan pengembangan kolonialisme ke Pulau Sumatera kepulauan bagian Timur Indonesia.

Kebangsaan modern Indonesia diletakkan pada abad kesembilan belas. Pada abad ini sebagian perbatasan Indonesia ditetapkan dan berhasil mengintegrasikan seluruh potensi kedaerahan, militer dan ekonomi.

1.4.4 Okupasi Jepang (1842-1945)

Dalam kerangka dukungan invasi Jepang terhadap Tiongkok Utara, yang dimulai pada bulan Juli tahun 1937, Jepang membutuhkan banyak bahan bakar inya, biji besi, dan bahan mentah lain. sebelumnya Jepang mengimpor

material seperti ini dari luar negeri. Jepang mengjajah Indonesia, menjamin persediaannya. Okupasi Jerman terhadap Belanda pada bulan Mei 1940 mendorong permintaan Jepang dari Hindia Belanda memasok barang sesuai permintaan bahan baku, khususnya minyak.

1.4.5 Setelah Kemerdekaan

A. Orde Lama.

A.1. Demokrasi Parlementer

Pada tahun 1945, Indonesia merdeka. Namun masih menyisakan perbedaan dalam bidang etnis, regional, kelas sosial, dan perbedaan agama. kemudian dibangun penyatuan sistem politik, sebagaimana diamanatkan pembukaan undang-undang dan ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1950 bahwa Indonesia menganut demokrasi parlementer.

Pemerintah bertanggung jawab kepada DPR. SUkarno menjadi presiden dibawah sistem baru ini. kekuasaan presiden berkurang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Terdapat perkembangan kultur dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kolonialis Belanda tidak mempersiapkan Indonesia ke dalam situasi pemerintahan sendiri. Jepang melaksanakan negara otoriter atas kolektivitas dan nasionalis etnil. Ide ini di diterima oleh pemimpin seperti Sukarno.

Kondisi Indonesia masih jauh dari menyenangkan pada masa ini. kondisi ini diperparah oleh gangguan ekonomi, kerusakan industri pada masa dan sesudah perang, angka pertumbuhan penduduk yang tidak tertahankan, kekurangan pangan dan kelaparan. pada pertengahan tahun 1950-an, prospek demokrasi di Indonesia memang sura. Sistem dari demokrasi parlementer berdampak pada masalah ekonomi dan korupsi yang semakin parah.

A.2. Demokrasi Terpimpin Sebuah periode disebut Demokrasi Terpimpin diumumkan pada tahun 1959 karena Sukarno sudah tidak sabar dengan politik partai. Pada masaini Sukarno mengumumkan

menjadi presiden seumur hidup dan presiden di atas semua sistem politik. Situasi ekonomi pada masa ini menghasilkan Suharto menjadi

pelaksana tugas presiden pada 11 Maret 1962, dan merupakan mulainya Orde Baru.

B. Orde Baru

Sebagaimana halnya dengan demokrasi terpimpin, dibawah Orde Baru, Suharto menjadi otoriter, tetapi berhasil membawa Indonesia kepada stabilitas nasional yang baik.

Mungkin salah satu keketidaksinambungan antara Sukarno dan Suharto adalah kebijakan ekonomi. Suharto menggunakan ekonomi demi tujuan akhir politik.

Soekarno membangun ekonomi Indonesia adalah dengan cara, melakukan pembangunan proyek ambisius, nasionalisasi perusahaan asing, dan menolak untuk melakukan langkah-langkah penghematan direkomendasikan oleh donor asing. Pada sisi lain, Soeharto menggunakan ekonomi untuk tujuan politik, umumnya didukung oleh infus besar bantuan dan investasi asing.

Pada awal Orde baru, pencapaian ekonomi sangat besar dan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia berhasil ditingkatkan.

Ekonomi Orde Baru sangat terbantu oleh pendapatan minyak, contoh pada tahun 1973 terjadi kenaikan harga minyak sebanyak empat kali lipat, kemudian secara global dikenal dengan istilah "oil shock". Indonesia bereguk dari negara miskin menjadi negara berpenghasilan sedang. Orde Baru berhasil mengembangkan varietas padi baru yang hasilnya tinggi dan program insentif pemerintah dalam bidang pertanian.

Pada sebagian besar wilayah Nusantara standar gizi dan kesehatan masyarakat ditingkatkan secara substansial. Ekonomi minyak sangat penting bagi rezim Soeharto dan menggunakannya demi tujuan stabilitas politik. Oil boom (1973-1981) menghasilkan revisi mendasar dari kebijakan industri. Pemerintah Indonesia melakukan reorientasi ekonomi dalam bidang industrialisasi dan impor. Negara terlibat dalam perdagangan dan industri seperti industri minyak bumi dan gas alam.

Orde baru melakukan kontrol politik yang ketat dan mempropagandakan ideologi nasional (Pancasila) mungkin telah membantu stabilitas, tetapi tidak mempersiapkan modernisasi politik. Di atas kertas terjadi peningkatan

[pendidikan, kelas menengah bertumbuh, kemiskinan berkurang. akan tetapi dasar menjadi negara demokrasi modern tidak dipersiapkan.

Pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan global. Orde Baru kehilangan pembenaran ekonomi yang telah dijamin pendukungnya. Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. dua bulan setelah terpilih menjadi presiden untuk ketujuh kalinya.

Berikut dirinci tahapan-tahapan program ekonomi Orde Baru

B.1. MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

Masalah yang dihadapi

Orde Baru berkata bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewengan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan.

Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu : 1) Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% *Turunan produksi nasional*

Rencana dan Kebijakan Ekonomi

Pada tahun 1966 diterbitkan Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang: Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966. Ketetapan MPRS ini menetapkan sejumlah program antara lain:

- (1) Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968, (angka pendek)
 - a. Skala Prioritasnya dari Program ini adalah 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Pencukupan kebutuhan pangan
 - 3) Rehabilitasi prasarana

ekonomi 4) Peningkatan kegiatan ekspor 5)
Pencukupan kebutuhan sandang

b. Komponen Rencana dari program:

1) Rencana fisik dengan sasaran utama : (a) Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang) (b) Pemulihan dan peningkatan prasarana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

c. Rencana Moneter dengan sasaran utama : (1) Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik. (2) Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

d. Tindakan dan Kebijakan Pemerintah 1) Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. 2) Serangkaian kebijakan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain : (1) Kebijakan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga) (2) Menyeimbangkan/ menurunkan defisit APBN dari 73, 7

Mengesahkan / memberlakukan undang-undang : (1) UU Pokok Perbankan No. 14/ 1967

(2) UU Perkoperasian no. 12/ 1967 (3) UU Bank Sentral No. 13/ 1968 (4) UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968 (5) Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967.

(2) Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970 (jangka panjang).

a. Program Pembangunan Jangka Panjang Orde baru menetapkan skala prioritas sebagai berikut: 1) Bidang pertanian 2) Bidang prasarana 3) Bidang industri/ pertambangan dan minyak

b. Jangka waktu dan strategi pembangunan 1) Pembangunan jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan

dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970 2) Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :

- b.1. PELITA I 69 / 70 = 73 / 74 : Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.
- b.2. PELITA II 74/75 – 78/79 Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
- b.3. PELITA III 79/80 – 83/84 Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi.
- b.4. PELITA IV 84/85 – 88/89 Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.
- b.5. PELITA V 89/90 – 93/94 Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

II) MASA PEMBANGUNAN EKONOMI (1969 – 1998)

A. Masa Oil Boom (1973 – 1982).

- Indonesia mengalami kejayaan ekonomi akibat Oil Boom. Dua kali Oil Boom.
- 1) Oil Boom I (1973/1974): Oil Boom I terjadi ketika harga minyak di pasar dunia melonjak dari US1.67/barrel (1970) menjadi US 11.70/barrel (1973/74), karena adanya krisis minyak sebagai akibat tindakan boikot negara-negara OPEC (timur Tengah) yang sedang konflik dengan Israel.

- 2) Oil Boom II (1979/1980): Harga minyak yang telah mencapai 15.65 Dolar Amerika Serikat/ barrel (1979) melonjak lagi menjadi 29.50

Dolar Amerika Serikat / barrel (1980), terus melonjak 35.00 dolar Amerika Serikat (1981 – 1982)

Dampak dari Oil Boom

Oil Boom memberi dampak positif. tetapi pada sisi lain menyisakan dampak negatif.

- a) Dampak Positif (menguntungkan) Selama Pelita I, II, III (1973/74 – 1979/80) nilai keseluruhan ekspor Indonesia meningkat :

- 1) Awal Pelita I: Ekspor Indonesia dari 1 miliar Dolar Amerika Serikat meningkat menjadi 3,6 miliar Dolar Amerika Serikat (akhir Pelita I).
- 2) Awal Pelita II : Ekspor Indonesia dari 7,1 miliar Dolar Amerika Serikat meningkat menjadi 11,3 miliar Dolar Amerika Serikat (akhir Pelita II)
- 3) Puncaknya mencapai 23,6 miliar Dolar Amerika Serikat pada tahun 1981/1982.

Laju pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat :

- 1) Tiap Pelita rata-rata : Dari 7,2% terus meningkat mencapai 9,9%
- b) Dampak Negatif (Merugikan)

Dampak negatif dari Oil Boom terjadi pada bangsa Indonesia, antara lain adalah:

- 1) Bangsa Indonesia menjadi manja, hidupnya boros dan mewah.
 - Nilai ekspor naik 6,8 persen per tahun tapi diikuti naiknya nilai impor yang lebih tinggi, yaitu 16,6 persen per tahun.
 - Kebutuhan modal asing (pinjaman lunak) tidak menurun: rata-rata 562 juta Dolar Amerika Serikat per tahun (1970-1973), malahan meningkat rata-rata 1,646.9 juta Dolar Amerika Serikat per tahun

(1974-1984),

- 2) Bangsa Indonesia menderita penyakit belanda (*the Dutch disease*), dengan gejala se-bagai berikut:
- Laju inflasi dalam negeri lebih tinggi dari inflasi dunia (negara partner dagang) sebagai akibat besarnya monetisasi penerimaan negara dalam valas.
 - Defisit APBN (dalam rupiah) ditutup dengan surplus penerimaan (dalam valas). Akibatnya jumlah uang beredar meningkat, inflasi meningkat.
 - Laju pertumbuhan yang uang beredar jauh lebih besar, rata-rata 34,9 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun selama 1972 – 1981

1.4.6 Dari Tahun 1998 Hingga Hari Ini

Setelah berakhirnya era Orde Baru, yang diawali dengan Krisis Moneter global pada tahun 1997, Indonesia mengenal masa reformasi. Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi perekonomian, serta mendorong kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal. Dalam tulisan ini, kami melakukan analisis singkat mengenai berbagai upaya reformasi ekonomi di Indonesia setelah krisis finansial Asia 1997, hingga pertengahan tahun 2016. Tulisan ini memberikan narasi mengenai pengalaman reformasi ekonomi di Indonesia, baik yang berhasil maupun gagal dilakukan, pada masing-masing periode pemerintahan. Tulisan ini juga menjelaskan mengenai dinamika ekonomi politik, fitur, dan penekanan reformasi dimasing-masing periode, serta menarik sejumlah pelajaran dari berbagai upaya reformasi ekonomi di Indonesia setelah krisis.

1.5 Pelaku dan Peran Perekonomian dan Bisnis Indonesia

Pelaku Ekonomi adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, maupun konsumsi). Peran dan pelaku ekonomi dapat berupa itu perorangan maupun organisasi (pemerintah atau swasta) atau kelompok masyarakat.

Umumnya pelaku dalam suatu perekonomian dapat dikelompokkan menjadi rumah tangga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, luar negeri, dan lembaga keuangan.

Jenis Pelaku Ekonomi dan Bisnis dan Peranannya

Pelaku ekonomi di Indonesia jika digolongkan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda.

1. Rumah Tangga (*household*)

Rumah tangga sebagai ruang lingkup terkecil turut membangun masyarakat dan ekonomisecara umum. Rumah tangga sesungguhnya merupakan pelaku palaing mendasar dari sebuah ekonomi dan bisnis. Rumah tangga dapat berperan sebagai produsen maupun konsumen. sebagai produsen,dari rumah tangga perusahaan dapat menyewa tenaga kerja.

Selanjutnya rumah tangga menjadi konsumen yang membeli dan menerima manfaat dari mengkonsumsi produksi perusahaan atau produsen lain.

Pemerintah mendorong agar rumah tangga juga dapat berperan sebagai pelaku UsahaMikro, Kecil, dan Menengah

2. Produsen

Produsen adalah pelaku ekonomi yang menyediakan atau memproduksi barang dan jasa.Barang dan jasa ini selanjutnya dikonsumsi oleh konsumen. Di Indonesia, kosumen dapat berupa rumah tangga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

Perusahaan dapat bertindak dan berupa organisasi usaha yang dibentuk untuk meng- hasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi dapat menjadi lebih luas, karena dapat berperan sebagai produsen, dis-tributor, dan konsumen.

Peran perusahaan sebagai produsen termasuk juga dalam bidang upaya agar suatu produk yang diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen. Contoh perusahaan seperti ini adalah Perusahaan ritel, yang berfungsi memasarkan dan menjual produk dari perusahaan.

3. Pemerintah

Pemerintah juga merupakan pelaku ekonomi. Perekonomian dan Bisnis di Indonesia harus terkendali demi tujuan Nasional. Pemerintah harus menerbitkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak: Produsen, Konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan

Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dan bisnis dengan menerbitkan sejumlah peraturan ekonomi.

Pemerintah membuat kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan internasional, Pemerintah juga mempunyai sejumlah Badan Usaha Milik Pemerintah

Membuat Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang oleh pemerintah yang mengatur anggaran dan pendapatan negara. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi

Pemerintah juga membuat Peraturan Keuangan Internasional, yakni kebijakan keuangan yang berhubungan dengan dunia internasional, seperti perdagangan internasional, kerjasama ekonomi dengan negara mitra, dsb.

Pemerintah dapat berperan sebagai produsen dan sekaligus konsumen, dan juga distributor

4. Rumah Tangga Luar Negeri

Perlu dicatat bahwa Negara lain berperan dalam perekonomian dan bisnis Indonesia. Kebutuhan Indonesia tidak dapat diproduksi seluruhnya di Indonesia. Barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia juga diperlukan negara lain setelah kita menikmatikannya di dalam negeri.

Luar negeri dapat bertindak sebagai produsen, konsumen. Dari luar negeri kita mendapat investasi, mengimpor tenaga kerja. Ke luar negeri kita dapat mengeksport jasa tenaga kerja,

5. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah semua pihak yang melakukan kegiatan keuangan. Lembaga keuangan dapat berupa bank maupun bukan bank. Lembaga Keuangan berperan membantu meningkatkan perekonomian dan bisnis Indonesia. Umumnya, lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat.

Jenis-Jenis Perusahaan

Jenis perusahaan di Indonesia dapat digolongkan menurut beberapa kategori Berikut diuraikan jenis perusahaan di Indonesia.

Jenis Perusahaan Berdasarkan Lapangan Usaha:

1. Perusahaan Ekstraktif

Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang mengelola sumber daya yang tersedia di alam. Jenis usaha seperti ini antara lain pertambangan emas, perak batubara, penambangan dan pengolahan sumber daya alam kayu, pembuatan garam yang mengolah dari air laut, pertambangan mineral, timah, nikel dan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi.

Perusahaan ekstraktif umumnya mengambil sumber daya yang ada di alam tanpa melalui proses pengolahan. Beberapa contoh dalam jenis ini adalah PT Freeport, PT Pertamina,

PT Bukit Asam, dan lain-lain.

2. Perusahaan Agraris

Perusahaan Agraris adalah perusahaan yang mengolah hasil alam. Yang membedakan jenis usaha agraris dan usaha ekstraktif adalah bahwa perusahaan agraris mengolah dan memproduksi dari sumber produksi dari alam.

Perusahaan agraris antara lain berhubungan dengan bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Beberapa contoh jenis usaha seperti ini adalah PT Royal Coconut, PT Multi Dwi Tunggal, PT Indo Jaya Agro dan Intinusaflora.

3. Perusahaan Industri

Perusahaan Industri mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi sehingga barang tersebut menjadi barang siap pakai. Perusahaan industri dapat berupa perusahaan kerajinan atau perusahaan pakaian. contoh perusahaan industri antara lain, Pabrik Kerta Tjwi Kimia Tbk, Indoxide, Nestle.

4. Perusahaan Perdagangan

Perusahaan perdagangan menghimpun barang dan jasa dan menyalurkan kepada konsumen. Perusahaan perdagangan dapat berupa perusahaan ekspor - impor

Diberikan beberapa contoh perusahaan perdagangan di Indonesia: PT Matahari Store, PT Ace Hardware Indonesia Tbk, Indomaret, Alfamaret, dll.

5. Perusahaan Jasa

Jenis perusahaan adalah perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang jasa. Contoh perusahaan jasa di Indonesia adalah Alam Sutera Realty, Ciputra Development, Perguruan Tinggi Swasta (?)

Pelaku Ekonomi

Berikut ini disebutkan beberapa pelaku ekonomi dan bisnis di Indonesia.

1. Koperasi
2. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

3. Perjan (Perusahaan Jawatan)
4. Perusahaan

Berdasarkan Bentuk Hukum

Atas dasar Hukum, Indonesia mengenal sejumlah jenis perusahaan. berikut ini diuraikan jenis perusahaan dalam hal kaitannya dengan Hukum.

1. Perusahaan Berbadan Hukum
2. Perusahaan Tidak Berbadan Hukum

1.6 Soal dan Umpan Balik

1. Disamping keunggulan secara geografis, Indonesia mempunyai keterbatasan dalam pembangunan ekonomi. jelaskan keterbatasan geografis tersebut.
2. Narasikan sejarah ekonomi dan bisnis Indonesia sejak jaman penjajahan hingga tahun 2019.
3. Indonesia disebut pernah mengalami titik puncak perekonomian (melalui produksi harga minyak). jelaskan sisi positif dan negatif dari oil boom tersebut.
4. Menurut jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara keempat di dunia. Jelaskan keuntungan dan kelemahan negara berpenduduk besar seperti Indonesia.
5. Indonesia masih mengalami sebuah beban struktur ekonomi yang sudah terjadi sejak jaman kolonialisme, sebutkan dan jelaskan.
6. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Bagaimana Indonesia dapat memper-olehnya?
7. Dengan berbagai permasalahan dalam ketenagakerjaan Indonesia, mungkinkah Indonesia menjadi negara maju?
8. Indonesia mempunyai target sebagai negara ekonomi terbesar ke-5 dunia pada ulang tahun Indonesia ke-100, tahun 2045. Mungkinkah dicapai? jelaskan.
9. Jelaskan Konsep, Strategi, dan Sistem Ekonomi dan Bisnis Indonesia
10. Sebutkan dan jelaskan pelaku serta peranannya dalam perekonomian dan bisnis Indonesia.

BAB 2: Neraca-Neraca Makroekonomi Indonesia

2.1 Pengantar

Pada bagian ini dibahas neraca makroekonomi di Indonesia. Neraca ini perlu disusun karena Indonesia mengikuti pola penyusunan neraca makroekonomi di seluruh dunia (Panennungi, 2017).

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan Eurostat, International Monetary Fund (IMF), World Bank, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bersama-sama telah menyusun system of National Account (SNA) pada tahun 1993 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2008. SNA merupakan dasar penyusunan neraca makroekonomi di seluruh dunia.

Konsep utama dari SNA adalah

1. Analisis Pendapatan Nasional (lebih spesifik yaitu analisis Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Pengangguran).
2. Neraca Fiskal.
3. Neraca Pembayaran.
4. Neraca Moneter dan Finansial.
5. Hubungan Antar Negara dan Neraca Arus Dana.
6. Input Output. dan
7. Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Pada Modul ini akan dibahas ketujuh konsep dalam SNA tersebut.

2.2 Produk Domestik Bruto, Inflasi, dan Pengangguran

Metode Menghitung Pendapatan Nasional

Alat menghitung pendapatan nasional yang paling banyak digunakan adalah Produk

Domestik Bruto (PDB) / GDP = Gross Domestic Product. (salah satu alat mengukur output sebuah perekonomian). PDB = Produk Domestik Bruto. GDP merupakan sebuah penemuan penting peradaban abad 20.

1. Metode-metode Perhitungan Pendapatan Nasional.

Secara umum terdapat tiga cara penghitungan pendapatan nasional, 1. Cara Output (Output approach) 2. Cara pendapatan (income approach) 3. Cara pengeluaran (expenditure approach)

Masing-masing metode melihat pendapatan nasional dari Sudut pandang yang berbeda tetapi hasilnya saling melengkapi.

1. Metode Output Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan adalah membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor (industrial origin). 9 sembilan sektor utama (Badan Pusat Statistik) : kemudian dibagi-bagi sesuai dengan kondisi ekonomi. Jumlah output masing-masing sektor kemudian menjadi jumlah output seluruh perekonomian.

Hanya saja output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain, atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Jika tidak berhati-hati dapat terjadi penghitungan ganda (double counting / multiple counting). Akibatnya PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindarinya, maka dalam penghitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added) masing-masing sektor.

Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara. ; $NT \geq 0$ Dimana: NT = Nilai Tambah, NO = Nilai Output, dan NI = Nilai Input

Jual 1 container biji besi ke Swiss. Kemudian Swiss menjual jam Rolex.
– harga satu container biji besi = satu jam tangan Swiss.

Coklat: 1 kg biji coklat kering Rp. 8000. Satu bar coklat Swiss “24.000” – 100 gr.

Dari persamaan di atas sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses produksi merupakan proses menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan $NT_i > 0$. Sehingga PDB adalah: Dimana i = sektor produksi ke 1, 2, 3,..., n

Contoh: Output sektoral negara ABCD, tahun 2019

Nomor	Sektor Produksi	Nilai Output	Nilai Input	Nilai Tambah
1	Pertanian (kapas)	400	0	400
2	Pabrik benang	400	300	100
3	Pabrik tekstil	600	400	200
4	Pabrik garmen	800	600	200
5	Perdagangan Pakaian	1.000	800	200
Jumlah-		3.100	1.000	-

Data hipotetik

Dari Tabel 2 di atas dapat diperlihatkan bahwa PDB

‘PDB’ = 300 + 100 + 200 + 200 + 200 = 1000 bukan 3.100.

Tabel di atas menunjukkan perekonomian yang sangat sederhana, karena hanya terdiri dari 5 sektor produksi: dari pertanian dan perdagangan. Merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari kapas yang dihasilkan sektor pertanian. Kapas dibeli oleh pabrik benang, untuk diolah lebih lanjut. Benang yang dihasilkan dijual kepada industri tekstil. Tekstil menjual outputnya ke industri garment. Industri garment menjual

outputnya ke sektor perdagangan pakaian. Akhirnya sektor perdagangan pakaian menjual ke pemakai akhir (masyarakat)

Bila tidak hati-hati, kita akan berkata bahwa produksi total perekonomian ABCD samadengan nilai output total masing-masing sektor : $300 + 400 + \dots + 800 = 3100$. Pada hal sebenarnya adalah 1000. Misalnya output pabrik benang = 400, pada hal 300 merupakan hasil sektor pertanian.

Untuk menghindari penghitungan ganda, maka nilai PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah masing-masing sektor produksi. Karena itu perhitungan

PDB yang benar adala:

$$\text{PDB 2019} = 300 + 100 + 200 + 200 + 200 = 1000.$$

- b. Metode Pendapatan (*Income approach*) Metode ini memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antar tingkat *output* dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi sederhana di bawah ini.

$$Q = f(L, K, U, E)$$

Dimana Q = output, L = tenaga kerja, K = barang modal, U = uang/finansial, dan E = kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan.

K, L, U, E, dll. faktor = Total Faktor Productivity (TFP).

Digunakan fungsi/model Cobb-Douglas.

$$Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$$

Dimana :

A = perkembangan teknologi,

α = *share* dari kapital,

$\beta = \text{share dari Penduduk/Tenagakerja.}$

Tiga properti dari persamaan ini:

Constant return to scale (CRS) ketika $\alpha + \beta = 1$ Decreasing return to Scale (DRS) ketika $\alpha + \beta < 1$. Increasing return to Scale (IRS) ketika $\alpha + \beta > 1$

Jika

$\alpha + \beta = 1$, Disebut *Constant Return to Scale (CRS)*.

Artinya output perekonomian konstan dibandingkan dengan input-inputnya. Setiappeningkatan satu unit input-inputnya akan berdampak pada peningkatan 1 unit outputnya.

Jika $\alpha + \beta > 1$, Disebut *Increase Return to Scale (IRS)*.

Output perekonomian akan meningkat dibandingkan dengan peningkatan input-inputnya. Setiap penambahan satu unit input-inputnya akan berdampak pada peningkatan lebih dari 1 unit outputnya.

Jika $\alpha + \beta < 1$, Disebut *Decrease Return to Scale (DRS)*.

Output perekonomian akan berkurang dibandingkan peningkatan dengan input-inputnya. Setiap penambahan satu unit input-inputnya akan berdampak pada peningkatan kurang dari 1 unit outputnya.

Persamaan di atas menunjukkan juga bahwa untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, modal, uang/finansial, dan kemampuan entrepreneur.

Kemampuan entrepreneur adalah kemampuan dan keberanian mengkombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Mereka yang memiliki kemampuan entrepreneur disebut pengusaha.

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah dan gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah

pendapatana bunga. Untuk pengusaha adalah keuntungan.

Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional

$$PN = w + i + r + \pi$$

Dimana w = upah/gaji, i = pendapatan bunga, r = pendapatan sewa, dan π = *keuntungan*.

Di Indonesia Perhitungan pendapatan nasional yang dimaksud dalam teori jarang dipublikasikan. Contoh Amerika Serikat

c. Metode Pengeluaran (Indonesia menggunakan metode ini juga).

Menurut Metode Pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu.

Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:

1. Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption).
Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption). Pengeluaran rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang maupun jasa yang habis dipakai dalam tempo setahun atau kurang (durable goods), maupun barang yang dapat dipakai lebih dari satu tahun (Non-durable goods). 63/64% Ekonomi Indonesia ditopang oleh Konsumsi rumah tangga.
2. Konsumsi Pemerintah (Government Consumption). Adalah pengeluaran pemerintah yang dipakai untuk membeli barang akhir dan jasa akhir. Pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Itu sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah (sisi pengeluaran anggaran negara).
3. Pengeluaran Investasi (Investment Consumption).
Pengeluaran Investasi sering di sebut sebagai Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). PMTB merupakan pengeluaran

sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan/meningkatkan nilai tambah. Termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto (Net Investment), yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan. Penghitungan PMTDB menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran, lebih mempertimbangkan barang-barang modal baru (Newly capital goods). Barang tersebut merupakan output baru, karena itu harus diperhitungkan dalam PDB.

4. Ekspor Neto (Net Export): $X - IM$ (selisih antara ekspor dan impor). Yang dimaksud dengan ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor.

Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total dari lima jenis pengeluaran

$$Y = C + I + G + X - IM$$

Dimana C = konsumsi rumah tangga, G = konsumsi pemerintah, I = PMTDB, X = Ekspor, dan M = Impor.

Berikut diberikan contoh Perhitungan GDP Indonesia (Juta Dolar Amerika Serikat).

Tahun	Kuartal	Konsumsi		Investasi	Ekspor Barang dan Jasa	Impor Barang dan Jasa	PDB
		Rumah Tangga	Pemerintah				
		C _p	C _g				
				I	X	M	Y
1970	1	650.256	70.117	110.184	107.733	129.367	808.923
	2	664.919	71.945	110.916	105.880	130.445	823.214
	3	680.531	74.164	114.016	106.273	132.789	842.195
	4	697.094	76.773	119.484	108.914	136.398	865.867
1971	1	714.606	79.773	127.322	113.802	141.273	894.230
	2	733.069	83.164	137.528	120.936	147.414	927.283
	3	752.481	86.945	150.103	130.317	154.820	965.027
	4	772.844	91.117	165.047	141.945	163.492	1007.461
1972	1	752.168	87.711	185.391	145.684	161.336	1009.617
	2	791.226	95.852	203.859	165.860	177.377	1079.420
	3	848.029	107.570	223.484	192.338	199.520	1171.902
	4	922.577	122.867	244.266	225.118	227.767	1287.061
1973	1	1020.516	157.602	259.797	235.988	260.637	1413.266
	2	1128.297	173.711	285.453	292.655	301.682	1578.434
	3	1251.566	187.055	314.828	366.909	349.423	1770.934
	4	1390.322	197.633	347.922	458.748	403.859	1990.766
1974	1	1621.644	187.293	386.777	690.470	501.017	2385.166
	2	1760.544	199.601	426.491	768.562	554.433	2600.765
	3	1884.100	216.404	469.107	815.321	600.133	2784.799
	4	1992.312	237.702	514.624	830.748	638.117	2937.270

Figure 10: GDP Indonesia (Juta Dolar AS), Q1 - Q4, 1970 - 1974

Table 2: Pendapatan Amerika Serikat berdasarkan Pendelatan
Pendapaan (Milyar DolarAmerikat), 2019

Nilai Tambah		
Nomor	Sektor Pendapatan	Milyar Dolar US
1	Pendapatan Upah/Gaji (Computation of Employee)	4.004,6
2	Pendapatan non Gaji (Properties Income)	473,7
3	Keuntungan Perusahaan (Corporate Profits)	542,7
4	Pendapata Bunga Neto (Net Interest)	409,7
5	Pendapatan Sewa (Rental Income)	27,7
6	Pendapatan Nasional	5.458,4

Data hipotetik

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan berlangsung lama. Penyebabinflasi dapat berasal dari

- (1). Tarikan Permintaan (demand pull inflation),
- (2). Tekanan Biaya Produksi (cost push inflation), dan(3). Gabungan keduanya.

Inflasi yang disebabkan tarikan permintaan adalah inflasi yang didorong oleh permintaan masyarakat uang meningkat. Inflasi akibat tekanan biaya produksi berasal dari naiknya harga-harga input dalam produksi. sementara itu inflasi yang diakibatkangabungan keduanya dapat terjadi secara simultan.

Alat ukur inflasi umumnya digunakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Deflator PDB.

IHK hanya didasarkan atas harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Barang dan jasa yang dibeli bukan konsumen, seperti pemerintah, perusahaan diperhitungkan dalam Deflator PDB.

IHK dihitung berdasarkan suatu basis perhitungan yang tetap (Metode Laspeyres, -Laspeyres Price Index)

Deflator PDB tidak bisa menangkap perubahan harga pada barang impor untuk konsumen akhir karena barang/jasa jenis ini tidak melewati proses produksi. Sementara itu IHK dipengaruhi proses produksi.

Deflator PDB dihitung atas dasar kuantitas yang berubah-ubah sesuai dengan fluktuasi PDB (Paasche Price Index).

Di Indonesia pengelompokan IHK dilakukan berdasarkan pengelompokan barang dan/jasa menurut jenis pengeluarannya. Sejak tahun 2008, IHK di Indonesia dihitung berdasarkan pola konsumsi dari hasil Survei Biaya Hidup pada sejumlah kota yang mencakup 284 hingga 441 komoditas.

Sejak Januari 2020, IHK berdasarkan pola konsumsi didapat dari Survei Biaya Hidup 2018 (2018=100) di 90 kota. Sejak Januari 2014, IHK berdasarkan pola konsumsi didapat dari hasil Survei Biaya Hidup 2012 (2012=100) di 82 Kota. Sejak Juni 2008, IHK berdasarkan pola konsumsi didapat dari Survei Biaya Hidup 2007 (2007=100) di 66 kota.

IHK mencakup tujuh kelompok, yaitu

1. Bahan makanan,
2. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau,
3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar,
4. Sandang,
5. Kesehatan,

6. Pendidikan, rekreasi, dan olah raga, dan
7. Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

IHK dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode Laspeyers yang telah dimodifikasi.

Tabel berikut disajikan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia, 2016 -2020

Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu materi diskusi dan variabel penting dalam ekonomi makro. Pengangguran berarti ekonomi tidak dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan sepenuhnya dan juga mempengaruhi sosial politik sebuah ekonomi. Dalam beberapa kasus, presidenpun bisa jatuh atau berganti jika tidak dapat mengatasi pengangguran.

Tingkat pengangguran (emplyment rate) adalah jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan yang mencari pekerjaan dibagi dengan jumlah angkatan kerja. angkatan

Bulan	2016		2017		2018		2019		2020	
	IHK	Inflasi								
Januari	123,62	0,51	127,94	0,97	132,1	0,62	135,83	0,32	104,33	0,39
Februari	123,51	-0,09	128,24	0,23	132,32	0,17	135,72	-0,08	104,62	0,28
Maret	123,75	0,19	128,22	-0,02	132,58	0,2	135,87	0,11	104,72	0,1
April	123,19	-0,45	128,33	0,09	132,71	0,1	136,47	0,44	104,8	0,08
Mei	123,48	0,24	128,83	0,39	132,99	0,21	137,4	0,68	104,87	0,07
Juni	124,29	0,66	129,72	0,69	133,77	0,59	138,16	0,55	105,06	0,18
Juli	125,15	0,69	130	0,22	134,14	0,28	138,59	0,31	104,95	-0,1
Agustus	125,13	-0,02	129,91	-0,07	134,07	-0,05	138,75	0,12	104,9	-0,05
September	125,41	0,22	130,08	0,13	133,83	-0,18	138,37	-0,27	104,85	-0,05
Oktober	125,59	0,14	130,09	0,01	134,2	0,28	138,4	0,02	104,92	0,07
November	126,18	0,47	130,35	0,2	134,56	0,27	138,6	0,14	105,21	0,28
Desember	126,71	0,42	131,28	0,71	135,39	0,62	139,07	0,34	105,68	0,45
Tingkat Inflasi		3,02		3,61		3,13		2,72		1,68

Figure 11: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia, 2016 - 2020

Kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja. Termasuk dalam hal ini adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari kerja.

Di Indonesia, pengangguran diukur oleh BPS melalui program Survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas). Sejak tahun 2002-2004, Indonesia mengadakan Sakernas tahunan dan Sakernas triwulanan.

Pada Tabel berikut disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), Februari - Agustus, 2020 - 2021

2.2.1 Soal dan Umpan Balik

1. Hitunglah PDB ekonomi XYZ dari tabel berikut:
2. Buat dalam satu halaman, perhitungan PDB Indonesia tahun 2021 berdasarkan metode produksi. (9 sektor, yang terbagi lagi dalam berbagai sub sektor).
3. Berdasarkan tabel di bawah ini, hitunglah PDB Negara ABCD, 2019

Tabel 3: Nilai Tambah Ekonomi Negara ABCD, 2019

Nilai Tambah		
Nomor	Sektor Produksi (Kopi)	Nilai Output
1	Pertanian (kopi)	300
2	Biji Kopi basas	350
3	Biji Kopi kering	360
4	Industri Bubuk kopi	470
5	Perdagangan (makanan) kopi	500

Data hipotetik

Table 4: Nilai Tambah Ekonomi Negara ABCD, 2019

Output		
Nomor	Sektor	Nilai Output
1	Konsumsi Rumah Tangga (Private Consumption)	308,469
2	Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)	40,695
3	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Gross Capital Formation)	172,777
4	Ekspor Barang dan Jasa (Export of Goods and Services)	138.675
5	Impor barang dan jasa (Import of Goods and Services)	-131,660

Data hipotetik

Figure 12: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen),

Februari Agustus, 2020 - 2021

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut			
	2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
ACEH	5,40	6,59	6,30	6,30
SUMATERA UTARA	4,71	6,91	6,01	6,33
SUMATERA BARAT	5,25	6,88	6,67	6,52
RIAU	4,92	6,32	4,96	4,42
JAMBI	4,26	5,13	4,76	5,09
SUMATERA SELATAN	3,90	5,51	5,17	4,98
BENGKULU	3,08	4,07	3,72	3,65
LAMPUNG	4,26	4,67	4,54	4,69
KEP. BANGKA BELITUNG	3,35	5,25	5,04	5,03
KEP. RIAU	5,98	10,34	10,12	9,91
DKI JAKARTA	5,15	10,95	8,51	8,50
JAWA BARAT	7,71	10,46	8,92	9,82
JAWA TENGAH	4,20	6,48	5,96	5,95
DI YOGYAKARTA	3,38	4,57	4,28	4,56
JAWA TIMUR	3,60	5,84	5,17	5,74
BANTEN	7,99	10,64	9,01	8,98
BALI	1,25	5,63	5,42	5,37
NUSA TENGGARA BARAT	3,04	4,22	3,97	3,01
NUSA TENGGARA TIMUR	2,64	4,28	3,38	3,77
KALIMANTAN BARAT	4,47	5,81	5,73	5,82
KALIMANTAN TENGAH	3,33	4,58	4,25	4,53
KALIMANTAN SELATAN	3,67	4,74	4,33	4,95
KALIMANTAN TIMUR	6,72	6,87	6,81	6,83
KALIMANTAN UTARA	5,71	4,97	4,67	4,58
SULAWESI UTARA	5,34	7,37	7,28	7,06
SULAWESI TENGAH	2,93	3,77	3,73	3,75
SULAWESI SELATAN	5,70	6,31	5,79	5,72
SULAWESI TENGGARA	3,10	4,58	4,22	3,92
GORONTALO	3,29	4,28	3,41	3,01
SULAWESI BARAT	2,39	3,32	3,28	3,13
MALUKU	6,71	7,57	6,73	6,93
MALUKU UTARA	4,09	5,15	5,06	4,71
PAPUA BARAT	6,78	6,80	6,18	5,84
PAPUA	3,42	4,28	3,77	3,33
INDONESIA	4,94	7,07	6,26	6,49

2.3 Neraca Fiskal

Neraca Fiskal di Indonesia dilakukan mengacu pada IMF (2007 a, b,c, d). Salah satu acuan yang cukup baik di Indonesia tentang Neraca Fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja NEgara (APBNP diterbitkan oleh Departemen Keuangan Negara RI (2000) Secara umum, neraca fiskal dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 5: Dasar Neraca Fiskal

Output	
PENERIMAAN	PENGELUARAN
A. Penerimaan Rutin	D. Pengeluaran Rutin
B. Penerimaan Pembangunan	E. Pengeluaran Pembangunan
C. Hibah	F. Pinjaman Bersih
G. Pembiayaan: Luar Negeri, Do- mestik	-
A + B + C + G	D + E + F

Sumber: IMF

Dalam Tabel 6 disajikan neraca fiskal secara umum. Bagaimana neraca ini disusun?. Pemerintah mempunyai sejumlah kegiatan dalam pembangunan. Diantaranya adalah penyediaan barang publik seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, memberikan transfer subsidi kepada kelompok atau sektor tertentu, melaksanakan aktivitas produksi. dalam hubungannya dengan kebijakan fiskal, pemerintah melakukan kebijakan surplus dan kebijakan defisit untuk mendapatkan situasi ekonomi yang diinginkan, mengaasi fluktuasi ekonomi jangka pendek khususnya dari sektor permintaan.

Sejak tahun fiskal 2000/2001 Indonesia mengikuti neraca fiskal yang dianjurkan oleh IMF dalam Governement Finance Statistics (GFS) walau belum sepenuhnya mengikuti Governement Finance Statistics Manual (GFSM) tahun 2001 yang diterbitkan oleh IMF

Menurut GFS konsep yang sangat penting adalah bahwa pencatata fiskal dilakukan berdasarkan cash basis atau payment yakni mencatat penerimaan saat diterima dan pengeluaran saat dikeluarkan dan tidak mencatat jika transaksi berbentuk barang.

Berikut ini dijelaskan beberapa komponen dari Neraca FIskal yang perlu didiskusikan:

1. **Rekapitulasi Bank.**
umumnya sejumlah negara melaksanakan rekapitulasi. Pemerintah menyuntikkan modal kepada bank atau mengambil alih utang bank. Menurut GFS, pembayaran bunga yang dimasukkan ke dalam neraca fiskal.
2. **Penerimaan Privatisasi.**
Penerimaan ini seharusnya dimasukkan ke dalam pinjaman neto yang nilainya negatif (negative net lending). Mengapa? Karena aset ini sudah terlebih dahulu telah dibeli melalui transfer dan/atau rekapitalisasi.
3. **Keuangan Bank Sentral.**
Keuntungan dari Bank Sentral yang kemudian ditransfer ke pemerintah selanjutnya dan sebaiknya dicatat sebagai penerimaan pajak.
4. **Pembiayaan Defisit.**
Pemerintah setidaknya mempunyai empat cara menangani pembiayaan defisit (1). Meminjam dari Bank Sentral, (2). Meminjam dari sistem perbankan, (3). Meminjam dari lembaga nonbank, dan (4). Meminjam dari luar negeri.

2.4 Neraca Pembayaran

Balance of Payment (BOP) atau Neraca Pembayaran adalah pencatatan transaksi kegiatan ekonomi penduduk sebuah negara/ekonomi dan penduduk negara lainnya dalam suatu periode waktu tertentu.

Prinsip Neraca Pembayaran (Balance of Payment Manual/BOP) diberikan oleh IMF 1993 (IMF, 1999, 2007 b).

Berikut ini dibahas beberapa prinsip penting tentang Neraca Pembayaran:

1. Sistem pencatatan didasarkan atas double entry system dimana setiap transaksi akan berpasangan dengan tanda yang berlawanan. contoh, jika nilai ekspor dimasukkan ke dalam Neraca Pembayaran sebagai Kredit (diberi tanda +) dan pada saat yang sama deposito meningkat sebagai Debit (diberi tanda -)
2. Transaksi Riil (barang dan jasa) dicatat dalam Neraca Transaksi Berjalan (current account). Sementara itu Transaksi Modal/Finansial akan dicatat dalam Neraca Modal/Finansial (Capital/Financial Account).
3. Penduduk dengan kewarganegaraan asing seperti wisatawan, pekerja migran, diplomat, tentara penjaga perdamaian asing diperhitungkan sebagai orang asing. Pada sisi lain, perusahaan multinasional yang beroperasi dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) diperhitungkan sebagai bukan asing. Sektor pemerintah yang bekerja di luar negeri tetap diperhitungkan sebagai penduduk.
4. Perhitungan dan penilaian transaksi didasarkan atas harga pasar dan nilai tukar saat itu. Jika ternyata tidak dapat dengan harga pasar (misal karena barter) maka harga pasarnya perlu diperkirakan.

Tahun 1999, IMF memberikan kerangka Neraca Pembayaran seperti tabel berikut.

Neraca Transaksi Berjalan (Current Account) terdiri dari Perdagangan Barang dan Jasa dengan mengikuti asumsi free on board (f.o.b), Pendapatan Faktor Produksi (gaji/upah, Pendapatan Modal termasuk FDI, portofolio), dan transfer berjalan.

2.5 Neraca Moneter dan Finansial

Neraca Moneter Indonesia mengacu pada Monetary and Financial Statistics Manual (MFSM) yang diterbitkan oleh IMF (2000). Neraca ini menjadi potret dari seluruh transaksi dari pelaku ekonomi dan merupakan variabel penting dalam analisis ekonomimoneter.

Sistem perbankan terdiri atas:

1. Otoritas Moneter (Monetary Authority), dan

Tabel 6: Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran	
1. Transaksi Berjalan	2. Neraca Modal dan Finansial
- A. Barang dan Jasa	A. Neraca Modal
–Barang	–Transer Modal
–Jasa	–Akuisisi Aset Nasional
—Transportasi	B. Neraca Finansial
—Turisme	—Investasi Asing Langsung Bersih
—Jasa Pemerintab	—Investasi Portofolio Bersih
— Jasa lainnya	—Investasi Lainnya
B. Pendapatan Faktor Produksi	—Pinjaman/Kredit Dagang
—Upah /Gaji	—Penggunaan Kredit/Pinjaman IMF
—Pendapatan Investasi/Modal	C. Cadanngan
-	—Emas
Cadangan IMF	C. Transfer Berjalan
-	Posisi Cadangan dalam IMF
-	Valuta Asing
-	Klaim
	lainnya

Sumber: IMF

2. Bank Pencipta Uang Giral (Deposit Money Banks).

Untuk memahami sistem perbankan diperlukan mendasarinya pada data Neraca Sistem Moneter atau Neraca Sistem Moneter (monetary survey).

Monetary survey merupakan konsolidasi dari:

1. Neraca Otoritas Moneter (Balance Sheet of Monetary Outhority), dan

2. Neraca Bank Pencipta Uang Giral/BPUG, -(Consolidated Balance Sheet of the Deposit Money Banks/DMBs).

Sesungguhnya sistem perbankan adalah sistem finansial dalam Neraca Sistem Finansial (Financial Survey) yang adalah konsolidasi dari Neraca Sistem Perbankan (Monetary Survey) dan Neraca Sistem Lembaga Keuangan lainnya (Consolidated Balance Sheet of Other Financial Institution).

Hap yang paling utama dan penting dalam kebijakan moneter adalah pengendalian uang beredar, Kebijakan ini terdiri atas dua hal.

1. Kebijakan Ekspansif, dan
2. Kebijakan Kontraktif.

Uang beredar adalah kewajiban sistem sistem moneter kepada sektor swasta domestik (dalam bentuk uang kartal, uang giral, maupun uang kuasi).

Pembahasan tentang Neraca Moneter dan Finansial kita pilah menjadi tiga bahandiskusi:

1. Neraca Otoritas Moneter,

Tabel 7: Neraca Otoritas Moneter

Neraca Otoritas Moneter	
Aset Luar Negeri Bersih Aset Domestik Bersih Kredit Domestik Bersih 1. Tagihan pada Pemerintah Bersih 2. Tagihan pada BPUG 3. Tagihan pada Sektor Domestik lainnya Lainnya	Uang Primer – Uang Kartal Uang Deposit

Sumber: IMF

2. Neraca Bank Pencipta Uang Giral (BPUG)

Fungsi BPUG adalah sebagai intermediasi antara penabung dan investor/peminjam. Salah satu hal yang sangat berpengaruh pada BPUG yakni penetapan Reserve Requirement dari Otoritas Moneter. penetapan ini akan mendorong ekspansi atau sebaliknya sebagai penahan ekspansi. Tabel berikut ini menjelaskan secara sederhana neraca BPUG.

3. Neraca Sistem Moneter/Perbankan (Monetary Survey)

Neraca sistem Moneter/Perbankan (monetary survey) adalah Neraca Otoritas Moneter

Tabel 8: Neraca Bank Pencipta Uang Giral (PPUG)

Neraca Bank Pencipta Uang Giral	
Aset Luar Negeri Bersih Reserve Kredit Domestik Bersih -1. Tagihan pada Pemerintah Bersih -2. Tagihan pada Sektor Domestik Lainnya Lainnya	Uang Giral Lainnya

Sumber: IMF

dan Neraca BPUG. Jika digabungkan hasilnya sebagai berikut

Table 9: Neraca Sistem Moneter/Perbankan (Monetary survey)

Neraca Sistem Moneter/Perbankan (Monetary Survey)	
Aset Luar Negeri Bersih Aset Domestik Bersih Kredit Domestik Bersih Tagihan pada Pemerintah Bersih Tagihan pada Sektor Domestik lainnya Lainnya	Uang Beredar (luas), (M2) Uang Beredar, (M1) Uang Kartal Uang Giral Uang Kuasi Tabungan berjangka Deposito Valas

Sumber: IMF

2.6 Hubungan Antar Negara dan Neraca Arus Dana

Pada bagian ini akan dibahas persamaan dasar yang menghubungkan keempat neraca yang didiskusikan pada bagian sebelumnya dengan berpusat pada Keseimbangan TRansaksi BERjalan (Current Account Balance, CAB). Diskusi ini akan mengantar kita kepada bagaimana Neraca Arus Dana (NAD), FLOW of Fund (FOB) diciptakan.

Pengenalan berkaitan antar nerac makroekonomi kemudian terjalin dalam keseimbangan pada NAD yang merupakan pengetahuan dasar dalam memahami Financial Programming.

Kita membagi pembahasan dalam dua bagian.

Bagian Pertama, melihat hubungan-hubungan antara neraca yang bersifat analisis hingga tabel Neraca Arus.

Bagian kedua, memberikan ilustrasi singkat dalam hal hubungan antar neraca dalam bentuk tabel neraca makroekonomi dasar.

1. Pendapatan dan Absorpsi

Kita memulai pembahasan ini dengan mengulang kembali perhitungan PDB dari sisi Pengeluaran.

$$GDP = C + I + G + X - M$$

$$GNI = C + I + G + -M + NTR$$

$$GNDI = C + I + G + X - M + NFI + NTR$$

$$CAB = X - M + NFI + NTR$$

$$A = C + G + I$$

$$GNDI = A + CAB$$

$$GNDI - A = CAB$$

dimana;

GNDI = Gross National Disposable Income = Pendapatan Nasional Kotor Disposabel.

A = Absorpsi/Konsumsi Domestik yakni Konsumsi dan Investasi.

CAB = Current Account Balance = Neraca Transaksi Berjalan.

NFI = Foreign Income Abroad (Net) = Pendapatan Faktor Luar Negeri Bersih. NTR = Transfer Abroad (Net) = Transfer Pendapatan Luar Negeri Bersih.

2. Pendapatan dan Kesenjangan Tabungan Investasi.

$$GNDI = C + S + T$$

$$GNDI = (C + S + t) - (C + I + G = S - i + t - g = CAB$$

$$GNDI = \text{Kesenjangan Tabungan Investasi Swasta } (Sp - Ip) + \text{Kesenjangan tabungan Investasi Pemerintah } (Sg - Ig) = CAB$$

Kita perhatikan bahwa CAB dapat surplus atau defisit. Nilai ini dipengaruhi oleh absorsi domestik. Jika absorsi domestik lebih besar dari GNDI akan terjadi defisit, atau sebaliknya.

Dari persamaan di atas dapat kita lihat bahwa surplus atau defisitnya CAB dipengaruhi oleh Kesenjangan Tabungan Investasi baik pada sektor swasta maupun pemerintah.

3. Sektor Swasta Domestik

Pada bagian ini kita melihat bagaimana sektor swasta (private, p) membiayai dirinya sendiri jika terjadi kesenjangan.

Kita perhatikan rumus berikut:

$$Sp - Ip = GNDIp - Cp - Ip = \text{Private } S - I_{gap} = Fp = \text{Kesenjangan Tabungan Investasi Swasta.}$$

Kita diskusikan bagaimana membiayai kesenjangan tersebut. Sektor Swasta dapat menutup kesenjangan melalui hal-hal berikut:

$$Fp = FDIp + NFBp + NDCp - M2 - NB + NL - OINp$$

Dimana:

$$FDIp = FDI = \text{Foreign Direct Investment} = \text{Investasi Asing Langsung}$$

$NFBp$ = Net of Private Foreign Borrowing = Pinjaman Swasta dari Luar Negeri Bersih.

$NDCp$ = Net of Private Domestic Credit = Kredit Swasta Domestik

$M2$ = Net of $M2$ = Perubahan Uang Beredar Bersih (Broad Money)

NB = Net of Government Bond = Obligasi Pemerintah Bersih.

NLp = Net Lending of Private = Pinjaman Bersih Swasta dari Domestik (non Moneter)

$OINp$ = Private Other Item Net = Perubahan Bersih Lainnya untuk Swasta

Dari persamaan di atas diperlihatkan bahwa sektor swasta dalam melakukan pembiayaan melalui kesenjangan investasinya dengan investasi asing langsung, mendapat pinjaman dari bank, atau meminjam dari luar negeri (dikurangi besar simpanan di bank dan melalui pembelian obligasi pemerintah oleh swasta), dan hal lain, seperti tambahan pinjaman bersih swasta dan domestik.

4. Sektor Pemerintah

Bagaimana Pemerintah membiaya diri sendiri jika terjadi kesenjangan tabungan dan investasi?

Kita tuliskan dalam persamaan berikut:

Conventional Deficit = $R_g - E_g = FG$ = Kesenjangan tabungan Investasi pemerintah.

Dimana

R_g = Revenues and Grants = Penerimaan Pajak dan Hibah.

E_g = Expenditures and Lending = Pengeluaran Belanja dan Utang

$E_g = C_g$ (current Expenditure/pengeluaran

rutin) + I_g (Investment/Investasi) $S_g = R_g -$

$C_g = R_g - (E_g - I_g) = R_g - E_g + I_g - S_g -$

$I_g - R_g - E_g - FG F_g - NFB_g + NDC_g +$

$NB - NL_g - OIN_g$

Dimana :

$NFB_g =$ Government Net Foreign Borrowing = Pinjaman Pemerintah dari Luar Negeri.

$NDC_g =$ Net Domestic Credit for Governement Both from CB and Off CB = Kreditsistem Perbankan kepada Pemerintah.

$NB =$ Net Domestic Bond = Pinjaman Obligasi Pemerintah dari Domestik

$NL_g =$ Net Lending of Government = Pinjaman BErsih Swasta dari Domestik(Non-moneter)

$OIN_g =$ Government Other Item Nete = Perubahan Bersih Lainnya untuk Pemerintah.

Kita dapat melihat bahwa pemerintah membiaya dirinya sendiri jika terjadi kesenjangan tabungan dan investasi, dapat dengan meminjam dari Luar negeri, meminjam dari bank, menjual obligasi, pinjaman lainnya dari swasta domestik, atau perubahan lainnya.

5. Sektor Luar Negeri
terhadap sektor Luar negeri, dapat digambarkan dalam hubungan-hubungan di ataraneraca meelalui CAB berikut

$NeracaPerdagangan = TB - X - M$

$NeracaTransaksiBerjalan = CAB = TB + NFI + NTR - X$

$$-M + NFI + NTR = GNDI - A$$

Mengatasi kesenjangan (surplus/defisit) dari CAB.

$$CAB = FDI + NFB - NFA - ONRA - OINf$$

Dimana

NFA = Net Foreign Asset = Perubahan Cadangan Devisa Bersih.

ONFA = Other Net Foreign Asset = Perubahan Aset Lainnya Bersih.

OINf = Foreign Other Item Net = Perubahan Lainnya Untuk Luar Negeri. Terlihat bahwa CAB sama dengan $X - M + NFI + NTR$ dimana $NTR = \text{Non Financial Transaction}$, = Over/Under Absorption = Perubahan Aset Luar negeri/Net Foreign asset dalam sistem perbankan ditambah dengan di luar sektor perbankan.

6. Sektor Moneter/perbankan

Pada sektor ini resource gapnya sama dengan Nol. Mengapa? Karena Sektor Moneter hanya merupakan refleksi dari transaksi barang dan jasa

$$Kesenjangan = 0 = -NFA - ONFA - NCS + M2 - OINB$$

Apa yang dapat ditarik dari persamaan ini? Perubahan uang beredar sama dengan total perubahan set ditambah total perubahan kredit domestik dikurangi dengan hal-hal lain.

2.7 Input Output

Input Output (IO) adalah salah satu neraca makroekonomi yang menyediakan data ekonomi dalam keseimbangan umum (Computable Genral Equilibrium/CGE).

Pada awalnya tabel IO (dalam Perang Dunia II) dapat membangun dalam produksi peralatan militer yang meningkat akibat

permintaan yang tak terduga.

IO kemudian digunakan dalam perencanaan dalam berbagai sektor pada tingkat regional dan nasional, dan juga antar regional.

Keberadaan IO tidak saja sebagai penyedia data, tetapi berfungsi sebagai model untuk analisis dengan menggunakan matriks dan terbantu dengan ditemukannya komputer yang dapat melakukan komputasi yang cepat

2.8 Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Social Accounting Matrix (SAM) atau Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) disajikan dalam bentuk tabel, dan biasanya lebih rumit daripada Tabel IO. Fondasi dari SNSE sesungguhnya adalah tabel IO.

Dalam hal pemilihan apakah menggunakan IO atau SNSE tergantung pada tujuan apa yang akan dianalisis. Jika ingin menganalisis aktivitas sektor ekonomi yang lebih rinci umumnya dipakai IO. Jika ingin melihat distribusi pendapatan atau distribusi pendapatan faktor produksi tenaga kerja, umumnya digunakan SNSE.

2.9 Soal dan Umpan Balik

1. sebutkan tujuh Neraca-Neraca Makroekonomi Indonesia.
2. Uraikan secara singkat definisi atau pengertian dari ketujuh neraca tersebut.
4. Sebutkan dan Jelaskan bagaimana mengukur PDB/GNP?
5. Untuk tujuan ekonomi yang lebih baik, pemerintah dikenal mempunyai dua kebijakan, Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Jelaskan dan sebutkan jenis-jenis kebijakan dari kedua kebijakan tersebut.
6. Apa perbedaan IO dan SNSE?
7. Bagaimana Indonesia melakukan keseimbangan oleh sektor swasta dan pemerintah?

3 BAB 3: Transformasi Perekonomian dan Bisnis Indonesia

3.1 Pengantar

Sebuah ekonomi yang terus menerus bertumbuh, dengan pendapatan per kapita yang meningkat, tentu saja akan mengalami perubahan secara mendasar. Ketika ekonomi bertumbuh seseorang akan mengalami perubahan pola konsumsi. persentasi konsumsinon makanan (seperti mobil, telepon pintar, komputer, liburan, villa, apartemen, dlsb)akan meningkat dibandingkan dengan persentase konsumsi makanan. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa juga semakin meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan human kapital seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tenaga kerja juga akan mempunyai kemampuan memilih bekerja pada lapangan kerja non-fisik dan dengan imbalan/upah yang lebih tinggi.

Hal di atas secara agregat akan berpengaruh pada transfomasi ekonomi nasional. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, sejumlah proses terjadi dalam perekonomian, yakni proses akumulasi, proses alokasi, dan proses distribusi.

Pad modul ini, akan dibahas proses transformasi ekonomi di Indonesia dan diberikan bukti empiris dengan beberapa data yang terjadi dengan Indonesia.

Modul ini dibagi menjadi 4 bagian.

Bagian pertama: Transformasi Perekonomian dan Bisnis Indonesia danPerbandingannya dengan Negara Lain.

Khusus untuk bagian kedua dan ketiga materi akan dilakukan melalui penugasandengan membentuknya dari DAta riil Indonesia.

3.2 Konsep Dasar Transformasi Perekonomian dan Bisnis Indonesia

Jika kita membahas transformasi ekonomi, pertama-tama bagian diskusi adalah mendekatinya dari teori ekonomi pembangunan. teori ekonomi pembangunan yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi berkembang setelah Perang Dunia II. Ketika itu negara-negara yang baru merdeka memerlukan panduan dalam membangun ekonomi dan bisnisnya. Pertanyaan mendasar dari teori pembangunan adalah bagaimana negaratersebut belajar mengatasi persoalan ekonominya khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan.

Secara umum perkembangan teori konsep dasar transformasi ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam tiga periode (Todaro, dan Smith, 2000).

1. periode 1950 - 1960 an: Periode Linier.
2. Periode 1970 an : Perubahan Struktur.
3. Periode 1980: Periode Fundamentalisme Pasar.

Dapat ditambahkan bahwa pada periode 1970 an muncul juga teori yang bertolak belakang dengan periode sebelumnya, disebut Teori Demensia. Teori Demesia ini sangat kuat pengaruh politiknya.

Dua teori yang sangat berpengaruh dan terkenal pada masa Periode Linier yaitu Teori Rostow dan Harrod Domar. Teori ini sangat relevan digunakan ketika mendiskusikan transformasi ekonomi Indonesia.

Pada bagian ini akan dibahas Teori Harrodo Domar dan teori Pertumbuhan Solow sebagai dasar dalam memahami pertumbuhan ekonomi secara umum.

A. Model Harrod Domar

Ray Harrod dan Evsey Domard merupakan dua ekonom secara kebetulan mempunyai ide yang sama mengenai hubungan ekonomi dengan investasi. Model ini sering kali digunakan untuk melakukan prediksi ekonomi dan bisnis.

Model Harrod Domar mengandalkan tabungan untuk investasi (dari dalam negeri maupun dari luar negeri).

Berikut secara ringkas kita diskusikan teori Pertumbuhan Harrod-Domar.

1. Tabungan (saving, S) merupakan proporsi dari Output Nasional Y).

Kita tunjukkan dalam persamaan berikut

$$S = sY$$

2. Investasi (investment, I) merupakan perubahan Modal tetap atau capital stock (K)

$$I = \delta K$$

Terdapat hubungan tingkat K dan Y yang nilainya tetap sebesar k

$K/Y = k = COR$ Capital Output Ratio, yang sering dituliskan juga dalam bentuk

$$\delta K / \delta Y = k = (ICOR \text{ (Incremental Capital-Output Ratio)})$$

atau

$$\delta K = k \cdot \delta Y$$

3. Kita berikan contoh persamaan

$$ICOR_{1990-1993} = \frac{(PMTB_{89} + pmtbd_{90} + PMTDB_{91} + PMTDB_{92})}{(PDB_{93} - PDB_{89})}$$

Dimana PMTB adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto atau

Gross Domestic Fixed Capital Formation

Kita melihat bahwa efektivitas antara investasi dengan output mempunyai lag satu tahun. Asumsi ini dapat diubah sesuai dengan informasi dan data yang dimiliki

4. Tabungan (saving, S) kita asumsikan sama dengan Investasi (I)

$$S = I \text{ atau}$$

$$I = \delta K = k \cdot \delta Y \text{ atau}$$

$$S = s \cdot Y = k \cdot Y = \delta K = I$$

5. Kemudian kita lakukan substitusi untuk mendapatkan penyederhanaan

Kita dapat

$$s \cdot Y = k \cdot Y$$

$$\delta Y/Y = s/k \text{ atau}$$

$$g = s/k$$

dimana kemudian dapat bahwa g = sama dengan pertumbuhan

ekonomi. Kesimpulan dari model ini adalah bahwa

Pertumbuhan ekonomi (g) sama dengan proporsi tabungan dari pendapatan nasional

(s) dibagi dengan incremental capital output ratio (k).

Sejumlah implikasi penting dari persamaan Harrod - Domar

1. ICOR sering digunakan dalam memperhitungkan efisiensi ekonomi. Semakin kecil ICOR kita artikan bahwa ekonomi semakin efisien.

Contoh: Jika ICOR sebesar 4 mengandung arti bahwa kenaikan 1

unit output diperlukan 4 unit modal. Jika ICOR bernilai 3 mengandung untuk kenaikan 1 unit output diperlukan 3 unit modal.

2. Model Harrod - Domar digunakan untuk menghitung kebutuhan investasi jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu.
3. Model ini sering digunakan sebagai alat pembenaran aliran modal asing demi mendapatkan pertumbuhan ekonomi tertentu, ketika investasi domestik tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

contoh aplikasi model ini adalah Bantuan USA (Amerika Serikat) ke Eropa dalam program Marshall Plan sangat didominasi model Harrod-Domar.

B. Model Dua Sektor

Model ini diajukan oleh William Arthur Lewis. Model ini sederhana namun mampu memberikan landasan teori bagi transformasi struktural perekonomian (1960 - 1970 an). Model ini merupakan salah satu model dalam teori ekonomi pembangunan yang paling berpengaruh. Model ini sangat sederhana.

Model Dua Sektor mengasumsikan terdapatnya keadaan ketika surplus tenaga kerja yang secara tradisional memiliki Marginal Product of Labor (MPL) sebesar 0 (nol), artinya dalam keadaan tertentu penambahan tenaga kerja akan menambah output lagi. Tenaga kerja dapat bergerak ke sektor modern yang memiliki $MPL > 0$ jika perbedaan tingkat upahnya lebih dari 30% pada sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional. Pada sektor Modern, tingkat upah diberlakukan menurut MPL, sementara pada

tingkat tradisional tingkat upah berdasarkan APL (Average Product of Labor).

C. Model Pertumbuhan Solow

Model ini merupakan salah satu model ekonomi pertumbuhan yang sangat terkenal dan berpengaruh. Model Solow mampu menerangkan

sumber-sumber pertumbuhan ekonomijangka sangat panjang.

Berikut kita diskusikan asumsi penting dari Model Solow

Pertama : Fungsi ini bersifat Constant Return to Scale (CRS), dalam hal ini persentase kenaikan total input akan menambah output dengan persentase yang sama.

Kedua : Model Solso memakai asumsi the law of diminishing return, semakin lamapenambahan output akibat penambahan satu unit input akan semakin menurun.

Kita misalkan Y = output, K = Kapital, dan AL = Effective of Labor yang merupakan hasil kali Teknologi (A) dan Tenaga Kerja (L).

Kita tuliskan dalam persamaan

$$Y = f(K, AL)$$

output merupakan hasil transformasi in- put Modal, Tenaga Kerja, dan Teknologi. Dalam hal ini, K merupakan stok, investasi $I = \delta K$. *Investasi adalah perubahan daristok modal. perludicatat bahwa Modalmengalamidepresiasiyangber*

Diperlukan K sebagai pengurang investasi jika terjadi angka pertumbuhan penduduk (g_N) dan angka pertumbuhan teknologi (g_K).

Selanjutnya dapat kita tulis menjadi $(\delta + g_N + g_A)K$.

Faktor ini merupakan faktor pengurang dari penambahan stok modal.

Investasi didapat dari tabungan (S) yang merupakan bagian output yang tidak dikonsumsi.

Jika $Y = C + S$, dan dalam hal ini kita ausmsikan bahwa tabungan sama dengan investasi $S = I$.

Jika kita notasikan (s) merupakan proporsi dari Output Nasional

(Y), maka $S = s.Y$
 atau $S = s.f(K, \delta L)$

Selanjutnya kita lakukan sedikit manipulasi matematika sebagai berikut

1. kita kalikan fungsi produksi di atas dengan $(1/AL)$.

Hal ini berarti kita dapat menuliskan

$i = s.f.(K.\delta L)$ menjadi $I = s.f(k)$

$-(\delta + g_N + g_A).K$ menjadi $-(\delta + g_N + g_K).k$

2. Pertumbuhan ekonomi akan menuju keseimbangan jangka panjang yang disebut sebagai Steady State ketika kondisi tambahan modal per effective labor sama dengan modal per effective labor yang digunakan untuk mengganti dan memfasilitasi depresiasi, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan teknologi. kita beri simbol $\delta k = 0$.

Selanjutnya kita tuliskan

$\Delta k = s.f(k) - (\delta + g_N + g_A).k = 0$

Selanjutnya kita mendapat nilai k^* , dimana

$y = f(k^*)$, $i = sf(k^*)$ dan $-(\delta + g_N + g_A).k^*$

3.3 Soal dan Umpan Balik

Jawablah soal berikut dengan menggunakan data Indonesia.

1. Aplikasikan ICOR untuk perekonomian Indonesia tahun 2014 - 2019.

Catatan :

Lakukan langkah berikut:

- 1.1. Jumlahkan PMTDB (Pembentukan Modal Tetap Domestik

Bruto) yang mewakili ΔK (perubahan stok modal) dari tahun 2013 hingga 2018 dengan asumsi bahwa investasi memiliki lag satu tahun.

- 1.2. Lihat pergerakan pendapatan per kapita di Indonesia sehingga mahasiswa mempunyai gambaran tentang asumsi melalui analisis transformasi struktural di Indonesia terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
- 1.3. Buat analisis dan bukti empiris tentang transformasi Perpajakan dan Pendidikan di Indonesia.
- 1.4. Buat analisis dan bukti empiris tentang transformasi Industri Manufaktur dan Ekspor Indonesia, dan
- 1.5. Buat analisis dan bukti empiris tentang transformasi Ketenagakerjaan dan Pendapatan Indonesia.

[Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan]

4 BAB 4: Kebijakan Perekonomian dan Bisnis Indonesia.

4.1 Krisis Ekonomi di Indonesia

Krisis Ekonomi terjadi di Indonesia seiring dengan Krisis EKonomi Global. Hal iniberdampak luas bagi Indonesia dan berdampak pada politik.

Krisis finansial yang melanda Asia dan DUnia pada 1997 menyebabkan kontraksi padaperekonomian Indonesia sebesar 13%, serta depresiasi masif pada nilai tukar rupiah.

Indonesia merespon Krisis tersebut dengan memutuskan mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Program IMF dimulai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) yang pertama pada akhir Oktober 1997, yang berlanjut hingga Desember 2003. Dalam periode ini, empat presiden yang berbeda mengimplementasikan sejumlah program reformasi ekonomi dengan hasil yang beragam. Reformasi ekonomi pada periode setelah krisis ini lebih banyak didorong oleh program reformasi yang ditentukan IMF sebagai persyaratan untuk menerima bantuan.

Dalam hal kebijakan, IMF mensyaratkan agenda reformasi struktural, serta sejumlah langkah ke arah stabilisasi makroekonomi serta perbaikan kesehatan sistem finansial. Persyaratan IMF ini mencakup juga penghapusan monopoli cengkeh, serta penghapusan segala bentuk subsidi pemerintah untuk industri yang dianggap tidak layak secara ekonomi, seperti proyek mobil nasional Timor dan industri pesawat terbang. Sejumlah langkah reformasi tersebut sempat menghadapi tantangan besar, karena melibatkan orang-orang yang dekat dengan Presiden Soeharto. Namun, langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai usaha memulihkan kepercayaan publik dan pasar terhadap pemerintahan.

Pada Mei 1998, Presiden Soeharto mundur sebagai Presiden dan digantikan oleh Habibie. Pada bulan Juli 1998, diterbitkan persetujuan untuk program bantuan IMF yang baru, Kebijakan ini juga melibatkan strategi restrukturisasi korporasi serta program

restrukturisasi perbankan yang lebih luas. Namun, pada periode Habibie, terdapat skandal Bank Bali. Pemerintah menolak mengumumkan hasil audit Bank Bali kepada publik, seperti diminta IMF, yang berakibat penghentian sementara program IMF pada September 1999.

4.2 Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sejak jaman Orde Baru hingga saat ini, salah satu program pemerintah yang kuat dilakukan adalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

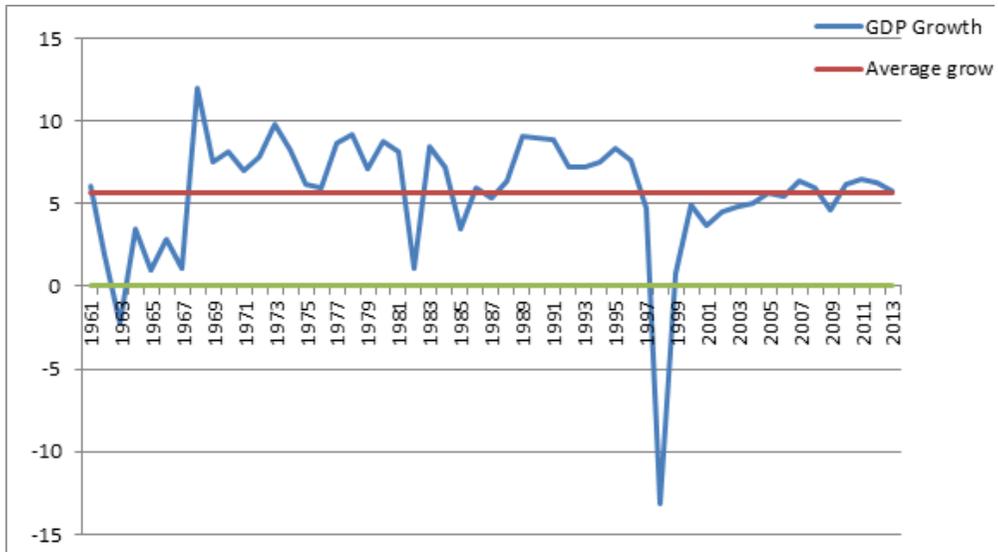
Penanggulangan Kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan (ekuitas). UUD 45 sudah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan Indonesia adalah milik dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan semua penduduk Indonesia. Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, penanggung jawab penanganan kemiskinan diberikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah Koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada Gambar 15 diperlihatkan terjadinya perbaikan kesejahteraan Indonesia. pada periode 1998 - 2010 terlihat bahwa persentasi kemiskinan Kota, Desa, dan Kota + Desa terus secara konsisten menurun. Hal ini membuktikan bahwa program pengentasan kemiskinan berhasil dengan baik.

Pemerintah optimis dengan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada Gambar 16 diperlihatkan proyeksi/simulasi Angka

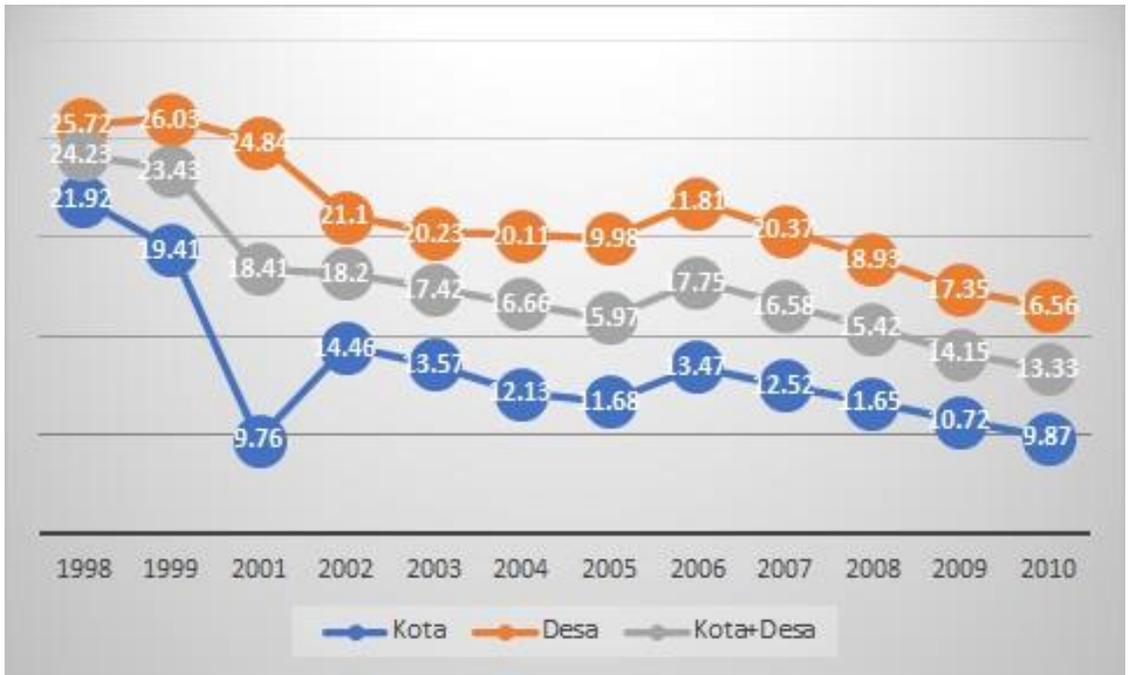
Kemiskinan Ekstrem di Indonesia 2021-2024 (TNP2K, 2021). Dalam proyeksi itu digambarkan bagaimana diharapkan situasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 - 2024.

Pada Gambar 17 disajikan Rencana Kerja Percepatan Penangan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia. Indonesia secara bersungguh-sungguh menangani dan mengentaskna kemiskinan terlihat dari rencana kerja tersebut



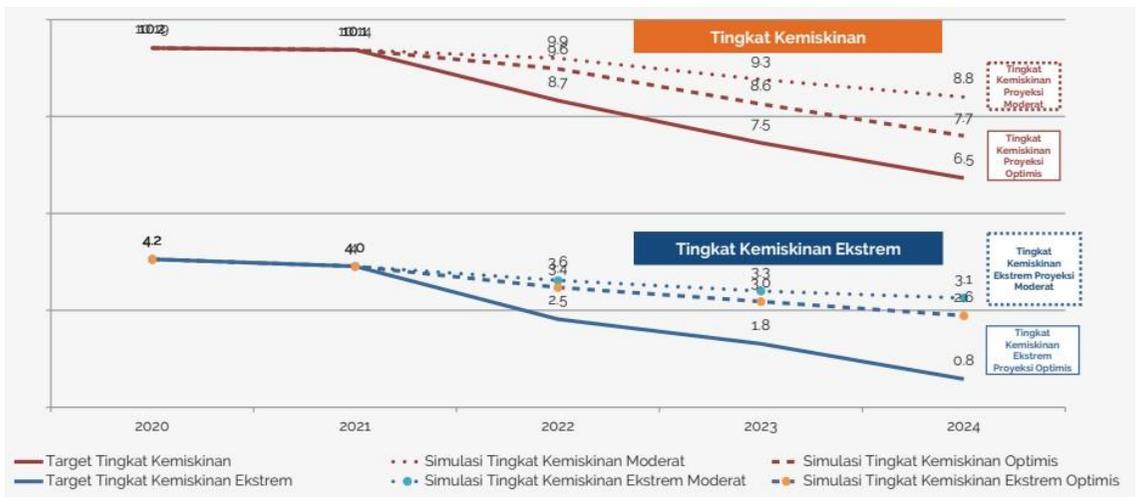
Sumber : World Bank, 2019. diolah

Figure 13: Angka Pertumbuhan EKonomi Indonesia, 1970 - 2002



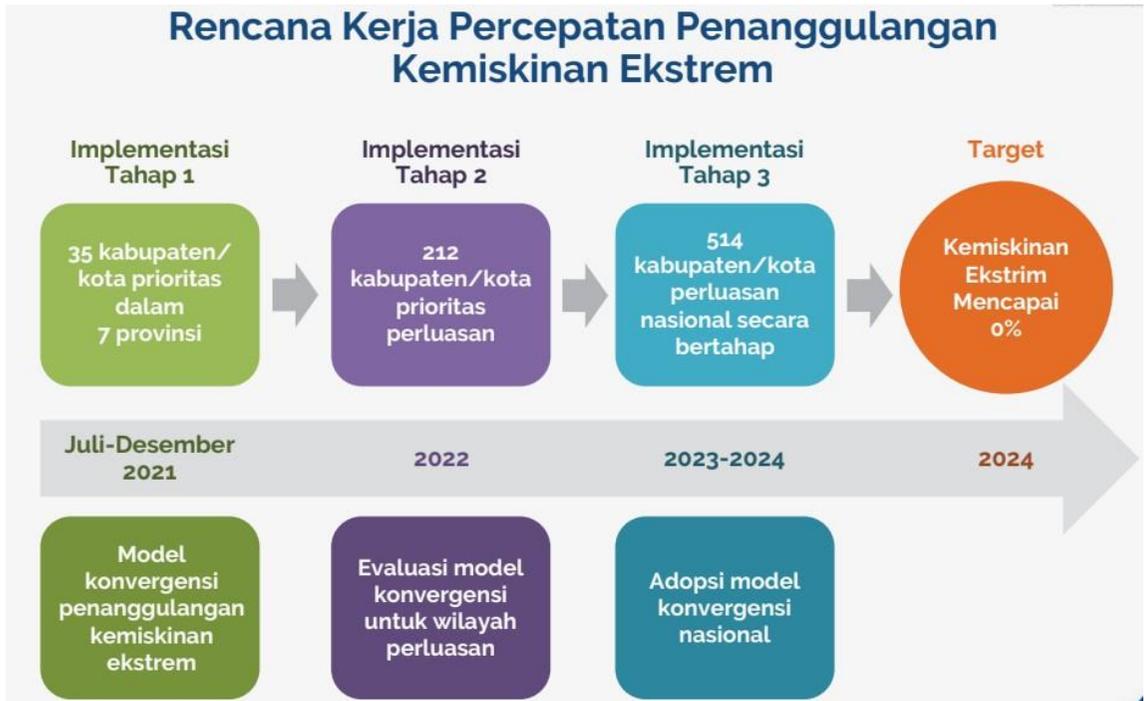
Sumber : BPS RI. diolah

Figure 14: Persentase Kemiskinan Kota, Desa, dan Kota + Desa, Indonesia, 1998 – 2010



Sumber : TNP2K. diolah

Figure 15: Simulasi Angka Kemiskinan Ekstrem, 2021-2024



Sumber : TNP2K. diolah

Figure 16: Rencana Kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

4.3 Perekonomian Indonesia dalam Era Globalisasi, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Indonesia merupakan anggota WTO dan keikutsertaan tersebut mendorong Indonesia dalam Era Globalisasi, Revolusi Industri (RI) 4.0 dan Society 5.0. Indonesia telah ikut dalam perkembangan dunia yang sangat cepat dan dinamis, khususnya dalam perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada bagian terdahulu sudah dibahas bahwa ultimate resources ekonomi Indonesia adalah penduduknya yang besar.

Kemudian pada bagian ini didiskusikan bagaimana Indonesia memanfaatkan RI 4.0 dan sumber Daya untuk kesejahteraan sebesar-besarnya penduduk Indonesia. Revolusi Industri 4.0 dibangun melalui Ekonomi Kreatif. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia masa depan terletak pada lautnya yang sangat luas.

4.3.1 Ekonomi Kreatif

Pembangunan ekonomi Kreatif di Indonesia (Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif Indonesia).

4.3.2 Ekonomi Maritim

”Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang,” Presiden Jokowi, dalam acara puncak Hari Maritim Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Kompas, Kamis, 23/9/2021).

wilayah Indonesia sebesar 60 persen terdiri dari laut. Artinya kekayaan kita sangat banyak di laut. Penataan ruang di masa datang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman.

Laut Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Sektor Perikanan Indonesia menyerak 7 juta tenaga kerja (Sander, 2019). Laut berkontribusi pada GDP sebesar 2,6 persen (26,9

Milyar dolar Amerika Serikat), dan 2,4 persen dari ekspor total Indonesia.

Tourisem Maritim dan Pantai juga merupakan potensi ekonomi dan bisnis Indonesia yang sangat besar. Sebesar 76 persen spesies koral dunia terdapat di Indonesia.

Tourisme koral Indonesia bernilai sebesar 3,1 Milyar Dolar Amerika Serikat. Sebesar 44 persen turis yang datang ke Indonesia dengan tujuan aktivitas pariwisata kelautan.

Potensi laut Indonesia belum sepenuhnya direalisasikan.

Dengan manajemen penangkapan ikan yang lebih baik dapat menghasilkan lagi sebesar 3,3 Milyar Dolar Amerika Serikat setiap tahun dalam 10 tahun ke depan. Dengan menjaga polusi dari kantong dan sampah plastik, dapat menghasilkan lebih banyak sebesar 171 juta dolar Amerika Serikat dari pariwisata dan perikanan.

Persoalan ekonomi dan bisnis kelautan Indonesia adalah penangkapan ikan yang tidak terkendali. Hal ini berdampak pada

1. Hampir setengah persediaan ikan liar Indonesia mengalami penangkapan berlebihan (overfish)
2. Datangnya kapal ilegal asing yang lebih kuat dan canggih ke perairan Indonesia telah merusak ekonomi dan bisnis laut Indonesia.
3. Manajemen penangkapan ikan yang tidak efektif.
4. Kesenjangan infrastruktur (penanggulangan sampah perairan, kumpulan sampah) di daerah tujuan wisata oleh penduduk lokal.
5. Perubahan iklim (climate change)
6. Kelebihan pariwisata (overtourisme) pada sebagian wilayah seperti Bali dan Lombok.

Salah satu persoalan utama industri maritim, (perikanan dan tourisme) Indonesia adalah sampah plastik.

Indonesia merupakan negara nomor 2 di dunia dalam hal sampah dan serpihal plastik. Sampah plastik Indonesia sebanyak 0,5 - 1,5 juta ton per tahun dibuang ke laut.

Sampah plastik Indonesia mengganggu

1. Tourisme Kelautan (marine tourism),
2. Perkapalan (shipping).
3. Kualitas makanan laut (seafood), dan
4. Kesehatan manusia

Polusi kantong plastik mengakibatkan hilangnya pendapatan sebesar 140 juta Dolar Amerika Serikat dari sektor pariwisata dan sebesar 31 Juta Dolar Amerika Serikat dari sektor perikanan setiap tahun.

4.4 Soal dan Umpan Balik

Jawab soal berikut dengan baik.

1. Jelaskan sebab-sebab eksternal yang mengakibatkan Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998.
2. Jelaskan apa dampak krisis ekonomi tahun 1997-1998 terhadap situasi politik di Indonesia. Maritim dan Ekonomi Kreatif, Jelaskan prospek ekonomi dan bisnis Indonesia dari kedua sektor ini.
3. Saat ini dunia mempunyai peluang dalam bidang Teknologi Informasi (Revolusi Industri 4,0), jelaskan bagaimana prospek tersebut. Apakah ekonomi kreatif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achidsti, S.A., 2011, The Historical Analisis: The CONformity of Traditional Market versus Global CONcept on WORld Development, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. XI No. 2 2022: 152-168.

Adirinekso, G.P., Purba, J.T., Budiono, S., Rajaguguk, W., 2020. The role of price and service convenience on jakarta's consumer purchase decisions in top 5 marketplace mediated by consumer's perceived value, in: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Anwar, Arsjad. 1995. Transformasi Industri Manufaktur dan Tantangan Masa Depan: Suatu Pemiikiran Awal. Dalam Buku Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan: Beragam Pemikiran, Gramedia dan ILUNI FEUI. Hill, Hal.2000. The Indonesian Economy, Second Edition, Cambridge University Press

Anwar, Arsjad. 1995. Transformasi Industri Manufaktur dan Tantangan Masa Depan: Suatu Pemiikiran Awal. Dalam Buku Alumni FEUI dan Tantangan MasaDepan: Beragam Pemikiran, Gramedia dan ILUNI FEUI. Hill, Hal.2000. The Indonesian Economy, Second Edition, Cambridge University Press

Arif, S. (2006) Negeri Terjajah, Yogyakarta, Resist Book

Aswicahyono, A., Christian, D., 2017, Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016, CSIS, CSIS Woking Paper Series, Economics Working Paper 02 – 2017

Aswicahyono, H., Christian D., 2017, Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016, CSIS Working Paper Series, WPECON-20172, Centre For Strategic andInternasional Studies.

Badan Pusat Statistik, Berbagai Publikasi terkait data ekonomi Indonesia <https://www.bps.go.id/index.php/Publikasi>

Badan Pusat Statistik, Berbagai Publikasi terkait data ekonomi Indonesia <https://www.bps.go.id/index.php/Publikasi>

Bank Indonesia (BI). Laporan Tahunan. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx>

Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) <http://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/riil/Contents/Default.aspx>

Booth, A., 1998, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries, A History of Missed Opportunities*, Macmilland Press Ltd, London. ISBN: 978-0-333-99496-2

Budiono, S., Purba, J.T., Rajagukguk, W., Samosir, P., Adirinekso, G.P., 2020. Measurement availability of clean water and elementary teachers towards income of all districts and cities in indonesia, in: *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.

Chenery, Hollis dan Moises Syrquin. 1975. *Patterns of Development 1950-1970*. The World Bank. Oxford University Press. <http://documents.worldbank.org/curated/en/482491468328816108/pdf/11913.pdf>

Dell, Melissa and Benjamin A. Olken. 2017. *The Development Effects of the Extractive Colonial Economy: The Dutch Cultivation System in Java*.

Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI), 2000, *Kebijakan Fiskal Memasuki Milenium Ketiga*, Badan Analisis Keuangan

dan Fiskan, Depkeu RI.

<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>

<http://obor.or.id/Perekonomian-Indonesia-dalam-Tujuh-Neraca-Makroekonomi-Series>.

http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/vkc.library.uu.nl/ContentPages/2531798963.pdf

<http://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/eksternal/Contents/Default.aspx>

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/cgmfs/eng/pdf/cgmfs.pdf>

<https://columbiapeseminar.files.wordpress.com/2015/09/dellapril2017.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/14150171/jokowi-laut-harus-kita-jaga-untuk-kepentingan-generasi-sekarang-dan-yang-akan-datang>.

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf> International Monetary Fund, Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide.

<https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf> International Monetary Fund, Balance of Payment Manual

International Monetary Fund (IMF), 1999, Macroeconomics Accounting in Transition Economy, International Monetary Fund.

International Monetary Fund, Statistical Department. 2007. The System of Macroeconomic Accounts Statistics: An Overview, International Monetary Fund. Pamphlet Series No 56. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam56/pam56.pdf>

International Monetary Fund, Statistical Department. 2007. The System of Macroeconomic Accounts Statistics: An Overview, International Monetary Fund.

International Monetary Fund, Statistical Department. 2007. The System of Macroeconomic Accounts Statistics: An Overview, International Monetary Fund. Pamphlet Series No 56. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam56/pam56.pdf>

International Monetary Fund, Statistical Department. 2007. The System of Macroeconomic Accounts Statistics: An Overview, International Monetary Fund.

International Monetary Fund, Statistical Department. 2007. The System of Macroeconomic Accounts Statistics: An Overview, International Monetary Fund. Pamphlet Series No 56. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam56/pam56.pdf>

International Monetary Fund, Statistical Department. 2007. The System of Macroeconomic Accounts Statistics: An Overview, International Monetary Fund.

—————, 2007 a, The System of Macroeconomic Account Statistics: An Overview, International Monetary Fund.

—————, 2007 b, Balance of Payment Manual, International Monetary Fund.

—————, 2007 c, Government Financial Statistics Manual, International Monetary Fund.

—————, 2007 d, Monetary and Financial Statistics Manual, International Monetary Fund.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022, Jumlah Pulau, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>).

Long-Term Consequences in Independent Indonesia, 1830-2000. http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/vkc.library.uu.nl/ContentPages/2531798

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan MPR Tahun 1993 tentang GBHN

Mankiw, N. G. (2016). Principles of microeconomics (8th ed.). CENGAGE Learning Custom Publishing.

Oxford University Press. <http://documents.worldbank.org/curated/en/482491468328816108/pdf/11913.pdf>

Pamphlet Series No 56.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam56/pam56.pdf> International Monetary Fund, Government Financial Statistics

Panennungi, Maddaremmeng, dan Novia Xu. 2017. Perekonomian Indonesia Dalam Tujuh Neraca Makroekonomi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <http://obor.or.id/Perekonomian-Indonesia-dalam-Tujuh-Neraca-Makroekonomi-Series>.

Panennungi, Maddaremmeng, dan Novia Xu. 2017. Perekonomian Indonesia Dalam Tujuh Neraca Makroekonomi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <http://obor.or.id/Perekonomian-Indonesia-dalam-Tujuh-Neraca-Makroekonomi-Series>.

Panennungi, Maddaremmeng, dan Novia Xu. 2017. Perekonomian Indonesia Dalam Tujuh Neraca Makroekonomi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Panennungi, Maddaremmeng, dan Novia Xu. 2017. Perekonomian Indonesia Dalam Tujuh Neraca Makroekonomi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <http://obor.or.id/Perekonomian-Indonesia-dalam-Tujuh-Neraca-Makroekonomi-Series>.

Purba, J.T., Budiono, S., Rajagukguk, W., Samosir, P., Adirinekso, G.P., 2020. Ebusiness services strategy with financial technology: Evidence from indonesia, in: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Purba, J.T., Budiono, S., Rajagukguk, W., Samosir, P., Adirinekso, G.P., 2020. Ebusiness services strategy with financial technology: Evidence from indonesia, in: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Purba, J.T., Budiono, S., Rajagukguk, W., Samosir, P., Adirinekso, G.P., 2020. E-business services strategy with financial technology: Evidence from indonesia, in: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Puspitawati, E. 2021, Indonesian Industrialization and Industrial Policy: Peer Learning from China's Experiences, South-South Integration and the SDGs: Enhancing Structural Transformation in Key Partner Countries of the Belt and Road Initiative, UNCTAD/BRI PROJECT/RP7.

Rajagukguk, W., 2016. The impact of joining wto on indonesia's economy: Econometric modelling approach. Actual Probl. Econ. 176.

Rajagukguk, W., 2016. The impact of joining wto on indonesia's economy: Econometric modelling approach. Actual Probl. Econ. 176.

Rajagukguk, W., 2016. The impact of joining wto on indonesia's economy: Econometric modelling approach. Actual Probl. Econ. 176.

Rajagukguk, W., 2016. The impact of joining wto on indonesia's economy: Econometric modelling approach. Actual Probl. Econ. 176.

Rajagukguk, W., Samosir, O., 2015, Fakta dan Prospek Pemanfaatan Jendela Kesempatan Dan Bonus Demografis: Suatu Studi Banding Di Sulawesi Utara Dan Nusa Tenggara Timur, UKI Press, Jakarta.

Rajagukguk, W., Samosir, P., Purba, J.T., Budiono, S., Adirinekso, G.P., 2020. Dark side of economic growth: A case study of the relationship between economic growth and suicide mortality, in: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations

Management.

Sander F.G., 2019, Indonesia Economic Quarterly, Oceans of Opportunity, WordBank Indonesia.

Susanti, Hera, et al. 2000 (atau yang terbaru jika ada). Indikator- Indikator Makroekonomi. Lembaga Penerbit FEB UI.

THEE Kian Wie. 2011. The Introduction, Evolution, and End of Colonial Extractive Institutions in the Netherlands Indies and Its Long-Term Consequences in Independent Indonesia, 1830 2000.

THEE Kian Wie. 2011. The Introduction, Evolution, and End of Colonial Extractive Institutions in the Netherlands Indies and Its

THEE Kian Wie. 2011. The Introduction, Evolution, and End of Colonial Extractive Institutions in the Netherlands Indies and Its Long-Term Consequences in Independent Indonesia, 1830 2000.

Todaro, M., Smith, S., 2000, Economic Development, Addison Wesley.

Tri, Sulistyono, Singgih. 2008. Konsep Batas Wilayah Negara di Nusantara: Kajian Historis.

UI Terkait Data Perekonomian Indonesia

United Nations Commodity Trade Statistics Database (UNCOMTRADE), Data perdagangan
<http://comtrade.un.org/db/default.aspx>

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Data Industri, <http://data.un.org/Data.aspx?d=UNIDOf=tableCode>

World Bank Indonesia. Indonesia Economic Quarterly Reports. <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economicquarterly-reports>

World Bank, World Development Indicators,

World Bank, World Development Indicators,

<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>